

Suleman Patiung | Batara Surya
Syafri | Andi Muhibuddin

Kawasan rawan banjir merupakan suatu ekosistem yang khas yang dapat di lihat dari berbagai sudut pandang. Adanya kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pola permukiman masyarakat dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Desa Pombakka umumnya mata pencaharian sebagai petani dan nelayan yang menghasilkan sumber-sumber pangan bagi kebutuhan hidup masyarakat yang berada disekitarnya secara khusus dan masyarakat di wilayah Luwu Raya pada umumnya.

Pola permukiman masyarakat yang dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang sering dilanda banjir akibat meluapnya Sungai Rongkong terutama pada musim penghujan mengakibatkan Sebagian permukiman masyarakat terendam banjir. Atas kondisi tersebut masyarakat di Desa Pombakka membuat pola permukiman yang sesuai dengan kondisi banjir tersebut. Penelitian ini mengkaji mengenai pola permukiman masyarakat di Desa Pombakka yang sering dilanda bencana banjir. Penelitian ini menggunakan teori yang mengkaji elemen-elemen permukiman (*Man, Society, Nature, Network, Shells*) yang memberikan kontribusi besar dalam penentuan pola permukiman yang digunakan oleh masyarakat agar s

POLA BERMUKIMAN MASYARAKAT

Suleman Patiung | Batara Surya | Syafri | Andi Muhibuddin

POLA BERMUKIMAN MASYARAKAT

STUDI PADA KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR



Penerbit
Pusaka Almailda

POLA BERMUKIMAN MASYARAKAT

STUDI PADA KAWASAN RAWAN
BENCANA BANJIR

**Suleman Patiung | Batara Surya
Syafri | Andi Muhibuddin**

**POLA BERMUKIM MASYARAKAT
STUDI PADA KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR**

Copyright@Penulis 2021

Penulis:

**Suleman patiuang
Batara Surya
Syafri
Andi Muhibuddin**

Editor:

**Syamsul bahri
Aslam Jumain**

Tata Letak

Mutmainnah

vi+71 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2021

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-320-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak seluruh atau iiebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa – Sulawesi Selatan – Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Pola Bermukim Masyarakat Studi Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implemintasi akademik.

Kawasan rawan banjir merupakan suatu ekosistem yang khas yang dapat di lihat dari berbagai sudut pandang. Adanya kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pola permukiman masyarakat dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Desa Pombakka umumnya mata pencaharian sebagai petani dan nelayan yang menghasilkan sumber-sumber pangan bagi kebutuhan hidup masyarakat yang berada disekitarnya secara khusus dan masyarakat di wilayah Luwu Raya pada umumnya.

Pola permukiman masyarakat yang dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang sering dilanda banjir akibat meluapnya Sungai Rongkong terutama pada musim penghujan mengakibatkan Sebagian permukiman masyarakat terendam banjir. Atas kondisi tersebut masyarakat di Desa Pombakka membuat pola permukiman yang sesuai dengan kondisi banjir tersebut. Penelitian ini mengkaji mengenai pola permukiman masyarakat di Desa Pombakka yang sering dilanda bencana banjir. Penelitian ini menggunakan teori yang mengkaji elemen-elemen permukiman (Man, Society, Nature, Network, Shells) yang memberikan kontribusi besar dalam penentuan pola

permukiman yang digunakan oleh masyarakat agar sesuai dengan kondisi wilayah sekitar yang sering dilanda banjir.

Atas rahmat, berkah dan petunjuknya pulalah sehingga berbagi pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan buku ini dan dalam masa studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin.

Makassar, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I POLA BERMUKIM MASYARAKAT: SEBUAH PENGANTAR	1
BAB II PERUMAHAN DAN POLA BERMUKIM...	3
A. Perumahan dan Permukiman.....	3
B. Pola Bermukim.....	6
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Permukiman.....	9
BAB III MANAJEMEN BENCANA BANJIR.....	15
A. Daerah Sempadan Sungai, dan Dataran Banjir.....	15
B. Kawasan Rawan Bencana Banjir.....	16
C. Dampak dan Akibat Banjir.....	21
D. Mitigasi Bencana Banjir	23
E. Kearifan Lokal Masyarakat	26
BAB IV STUDI POLA BERMUKIM MASYARAKAT DI KAWASAN RAWAN BANJIR	31
A. Kawasan Permukiman Sempadan Sungai	31
B. Fisik Rumah dan Permukiman	34
C. Sarana Prasarana Permukiman.....	35
D. Lingkungan Rumah Tinggal Masyarakat	37
E. Kapasitas Ekonomi Masyarakat.....	40
F. Kondisi Sosial Masyarakat	42

BAB V	ANALISIS POLA PERMUKIMAN MASYARAKAT YANG BERMUKIM DILOKASI RAWAN BENCANA BANJIR..	45
	A. Analisa Elemen Bangunan (Shells) Kondisi Fisik Rumah dan Permukiman	45
	B. Analisa Elemen Sarana Prasarana (network) Kondisi Fasilitas dan Perlengkapan Sarana Permukiman	50
	C. Analisa Elemen Alam (nature) Kondisi Lingkungan Rumah Tinggal Masyarakat	53
	D. Analisa Elemen Manusia (man) Kapasitas Ekonomi Masyarakat.....	55
	E. Analisa Elemen Masyarakat (society) Kondisi Sosial Masyarakat	57
	F. Model Pengaruh Elemen Permukiman...	60
BAB VI	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB 1

POLA BERMUKIM MASYARAKAT: SEBUAH PENGANTAR

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara sekitar 7.843,57 Km² terbagi dalam 12 kecamatan yang meliputi 173 desa/kelurahan. Terdapat delapan sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara dan sungai terpanjang adalah Sungai Rongkong dengan panjang 108 km yang melewati tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sabbang, Baebunta dan Malangke. Sungai Rongkong masuk dalam DAS Rongkong dengan luas 190.478 ha. Sungai Rongkong memiliki bentuk memanjang. Kemiringan lereng bervariasi dari datar, landai, bergelombang, berbukit sampai bergunung dengan persen kemiringan 0-8, 8-15, 15-25, 25-40, dan >40%.

Posisi Desa Pombakka yang berada di tepi sungai pada bagian hilir Sungai Rongkong sangat rentan dan rawan terhadap terjadinya bencana banjir terutama pada saat musim penghujan. Banjir yang melanda wilayah Desa Pombakka dapat menggenangi hampir keseluruhan permukiman dan rumah-rumah penduduk dimana tinggi genangan yang terjadi dapat mencapai 1,5 m (satu setengah meter) dari muka tanah asli. Frekuensi banjir dalam setahun antara dua sampai tiga kali. Seringnya kejadian banjir di desa tersebut tidak serta merta membuat masyarakat meninggalkan atau berpindah dari permukiman tersebut, bahkan rencana program relokasi pemerintah tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat setempat.

Terdapat upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk bertahan dari banjir yaitu dengan cara meninggikan rumah mereka, baik dengan menimbun maupun membuat rumah dengan tipe panggung, tetapi tentunya hal ini hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi. Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah bentuk antisipasi tersebut tidak mungkin mereka lakukan karena mahal biaya. Mereka hanya dapat pasrah bila rumah mereka kebanjiran.

Salah satu fenomena alam yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Utara adalah bencana banjir dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan kerusakan pada daerah yang ada disekitarnya. Masyarakat pada desa yang terdampak banjir mengungsi ke tempat yang aman, lahan pertanian berupa sawah yang terendam banjir berdampak gagal panen, kerusakan lahan perkebunan, ternak dan lain lain sangat merugikan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana Daerah (BNPBD) Kabupaten Luwu Utara, banjir yang terjadi pada tanggal 29 – 30 April 2019 yang merendam 6 (enam) kecamatan dan 17 desa yang mengakibatkan sebanyak 2.087 KK atau 6.504 jiwa mengungsi ke tempat yang aman.

Dari fenomena yang ada seperti yang diuraikan dalam latar belakang maka peneliti terdorong untuk mengkaji pola pola bermukim masyarakat di kawasan rawan banjir serta apa yang mempengaruhi sehingga masyarakat tetap bermukim pada kawasan rawan banjir di Desa Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

PERUMAHAN DAN POLA BERMUKIM

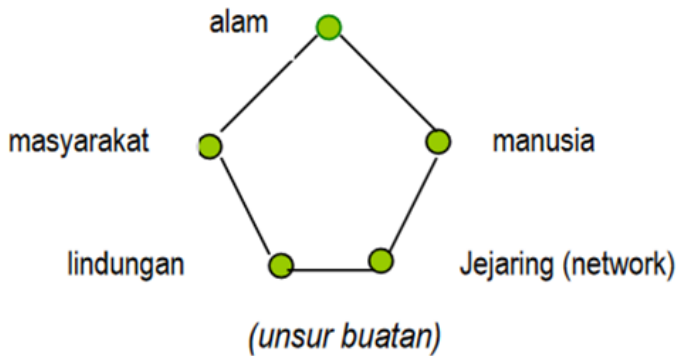
A. Perumahan dan Permukiman

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang “Perumahan dan Permukiman” dinyatakan bahwa permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi, perumahan merupakan wadah fisik, sedangkan permukiman merupakan paduan antara wadah dan isinya yaitu manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya.

Di dalam Sistem Permukiman, menurut Doxiadis (1968:35), permukiman adalah paduan antara unsur manusia dan masyarakatnya, alam dan unsur buatan. Semua unsur pembentuk permukiman tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi serta saling menentukan satu dengan lainnya. Lingkungan permukiman merupakan sistem yang terdiri dari lima elemen, yaitu:

- 1) *Nature* (unsur alam), mencakup sumber-sumber daya alam seperti geologi, topografi, hidrologi, tanah, iklim, dan unsur hayati seperti vegetasi dan fauna.
- 2) *Man* (manusia), mencakup segala kebutuhan pribadinya, seperti kebutuhan biologis, emosional, nilai-nilai moral, perasaan dan persepsinya.
- 3) *Society* (masyarakat), manusia sebagai bagian dari masyarakatnya.
- 4) *Shell* (lindungan), tempat dimana manusia sebagai individu dan kelompok melakukan kegiatan dan kehidupannya.

- 5) *Network* (jejaring), merupakan sistem alami atau yang dibuat manusia untuk menunjang berfungsinya lingkungan permukimannya, seperti jalan, jaringan air bersih, listrik, telepon, sistem persampahan dan lain sebagainya



Gambar 2.1 Sistim Elemen Permukiman

Semua unsur pembentuk permukiman manusia sebagai bagian yang saling terkait dan saling mempengaruhi serta menentukan satu dengan yang lain.

Menurut Turner (1972) "rumah bukan hanya sekedar kata benda melainkan kata kerja yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi penghuninya". Untuk membedakan kedua pandangan tersebut Turner menggunakan istilah *What it does* dengan makna kegunaan rumah bagi penghuni dan *What it is* dengan makna kondisi fisik rumah. Dalam bahasa Indonesia pengertian ini dapat diperjelas dengan membedakan perumahan sebagai pandangan terhadap kondisi fisik, dan permukiman sebagai pandangan terhadap makna yang dimiliki (Rahmawati, 2008).

Menurut Sumaatmadja (1981) Permukiman atau tempat kediaman penduduk (*settlement*) diartikan sebagai bagian permukiman yang dihuni manusia dengan segala sarana dan

prasarana yang menunjang kehidupan penduduk, yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan.

Permukiman secara defenitif merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ataupun hunian dan tempat kegiatan, yang mendukung perikehidupan dan mendukung penghidupan penghuninya (Hardoro, 2014:1) Lingkup permukiman mencakup kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian, memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi prasarana, sarana lingkungan, untuk tempat kerja terbatas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga pemukiman dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Prasarana yang dilengkapi dalam kawasan hunian merupakan ketentuan yang harus tersedia, yakni fasilitas dasar yang terdiri dari lingkungan fisik alami dan binaan, sehingga memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Prasarana tersebut antara lain (1) jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan bangunan yang teratur (pola bermukim), (2) jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, (3) jaringan saluran air hujan untuk drainase dan pencegahan banjir setempat.

Ketentuan lain adalah, apabila tidak terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar. Sarana lingkungan lain yang semestinya ada didalam kawasan lingkungan permukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan budaya. Fasilitas penunjang dapat meliputi akses ekonomi, antara lain, tersedianya bangunan perniagaan atau perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan, sedangkan fasilitas penunjang yang

meliputi aspek social budaya, antara lain bangunan pelayanan umum, dan pemerintah, Pendidikan dan kesehatan, peribadahan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, dan pertamanan.

B. Pola Bermukim

Pola adalah gambar yang dipakai untuk contoh, corak, sistem, bentuk yang tetap, kombinasi sifat kecenderungan yang khas, informasi bentuk pengorganisasian, teknik penyusunan, pedoman, kerangka, cara dan usaha (Depdikbud, 1988). Menurut Rapoport (1989), pola adalah alat untuk mengenali suatu fenomena. Pola permukiman merupakan segala sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan dalam menggambarkan suatu kondisi permukiman dengan menggunakan unsur-unsur dari permukiman itu sendiri.

Menurut Rapoport (1989:94-95), klasifikasi pola permukiman secara garis besar dapat dikenali melalui 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

- 1) Batas (*boundaries*) merupakan batas daerah kekuasaan suatu wilayah atau sebuah permukiman yang dibuat oleh masyarakat setempat, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik;
- 2) Jenis fasilitas (*massa*), yaitu pengelompokan elemen fisik dalam suatu permukiman yang merupakan tempat melakukan aktivitas sekaligus sebagai fasilitas bagi penghuni dan penggunaanya. Fasilitas permukiman ini dapat berbentuk fasilitas umum (*fasum*) dan fasilitas sosial (*fasos*);
- 3) Tata ruang (*zona*) merupakan pembagian daerah kegiatan penghuni dalam suatu permukiman, yang diatur berdasarkan struktur keyakinan, aturan-aturan adat atau kebiasaan masyarakat setempat;

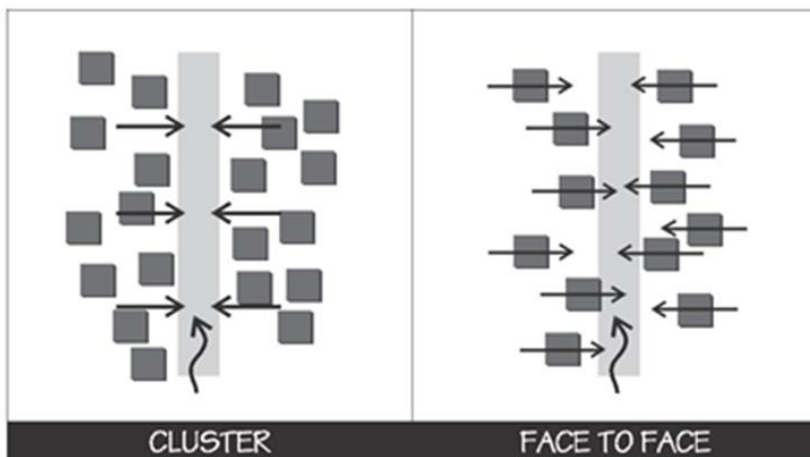
- 4) Ragam hias, yaitu unsur-unsur dominan yang banyak ditemukan pada permukiman, baik alami maupun buatan manusia (*craftmanship*). Ragam hias juga ada yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat adat setempat, ada juga yang tidak.

Abdullah (2000), juga membedakan pola permukiman secara garis besar menjadi 2 tipe yaitu; pola permukiman yaitu :

- 1) Mengumpul (*compact settlement*), pola ini dapat berbentuk radial, linier, dan papan catur.
- 2) Menyebar (*scattered, dispersed*), pola ini dapat berbentuk multi pusat dan tersebar murni.

Menurut Taylor (1980) Pola permukiman terdiri dari:

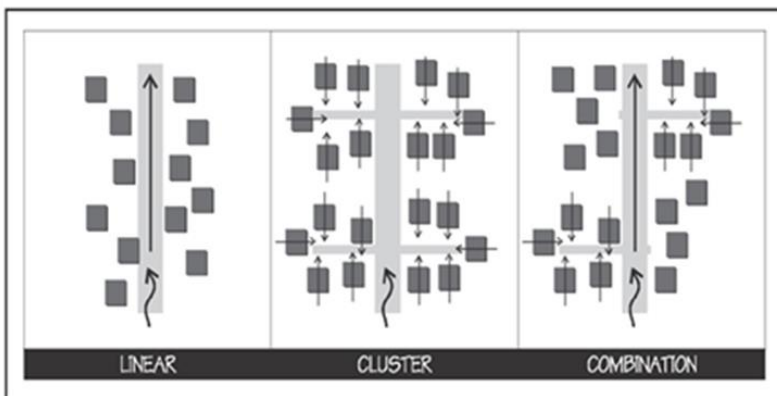
- 1) Sub Kelompok Komunitas (*Cluster*) yaitu pola permukiman tipe ini berbentuk cluster, terdiri dari beberapa unit atau kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting.
- 2) *Face to face* yaitu pola permukiman tipe ini berbentuk linier, antara unit-unit hunian sepanjang permukiman dan secara linier terdapat perletakan pusat.



Gambar 4 Pola Permukiman
Sumber: Taylor, 1980

Menurut Taylor (1980) Struktur Ruang Permukiman dikelompokkan menjadi:

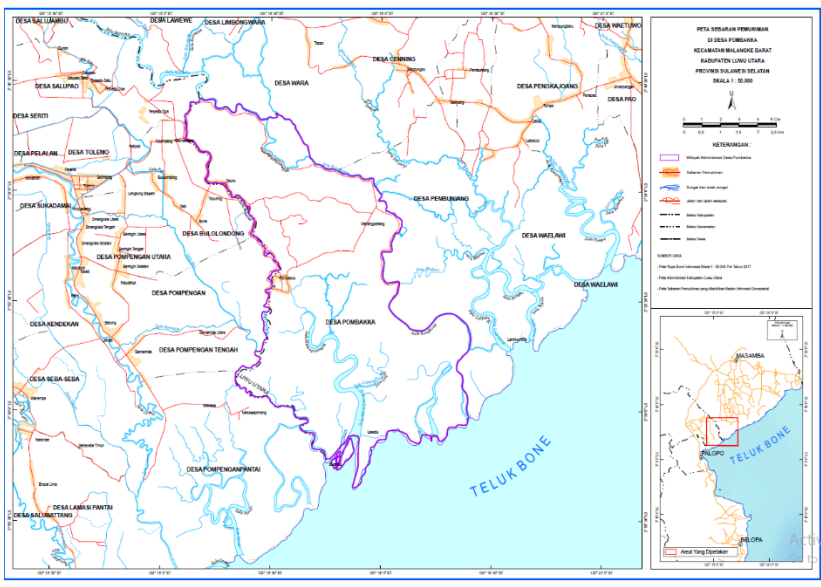
- 1) Linier, yaitu suatu pola sederhana dengan peletakan unit-unit permukiman (rumah, fasum, fasos dan sebagainya) secara terus menerus pada tepi sungai dan jalan. Pada pola ini kepadatan tinggi, dan kecenderungan ekspansi permukiman dan mixed use function penggunaan lahan beragam.
- 2) Cluster, pola ini berkembang dengan adanya kebutuhan lahan dan penyebaran unit-unit permukiman telah mulai timbul. Kecenderungan pola ini mengarah pada pengelompokan unit permukiman terhadap suatu yang dianggap memiliki nilai "penting" atau pengikat kelompok seperti ruang terbuka komunal dalam melakukan aktivitas bersama.
- 2) Kombinasi, yaitu kombinasi antara kedua pola di atas menunjukkan bahwa selain ada pertumbuhan juga menggambarkan adanya ekspansi ruang untuk kepentingan lain (pengembangan usaha dan sebagainya). Pola ini menunjukkan adanya gradasi dari intensitas lahan dan hirarki ruang mikro secara umum.



Gambar 5. Struktur Ruang Permukiman
Sumber: Taylor, 1980

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Permukiman

Keberadaan suatu permukiman dapat mempengaruhi berkembangnya suatu wilayah, dan sebaliknya kegiatan pembangunan dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi berkembangnya permukiman. Permukiman berkaitan secara langsung dengan kehidupan dan harkat hidup manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman cukup banyak, antara lain faktor geografis, faktor kependudukan, faktor kelembagaan, faktor swadaya dan peran serta masyarakat, faktor keterjangkauan daya beli, faktor pertanian, faktor ekonomi dan moneter. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pembangunan perumahan adalah disebabkan oleh perubahan nilai-nilai budaya masyarakat.



Gambar 6. Peta Sebaran Permukiman Desa Pombakka

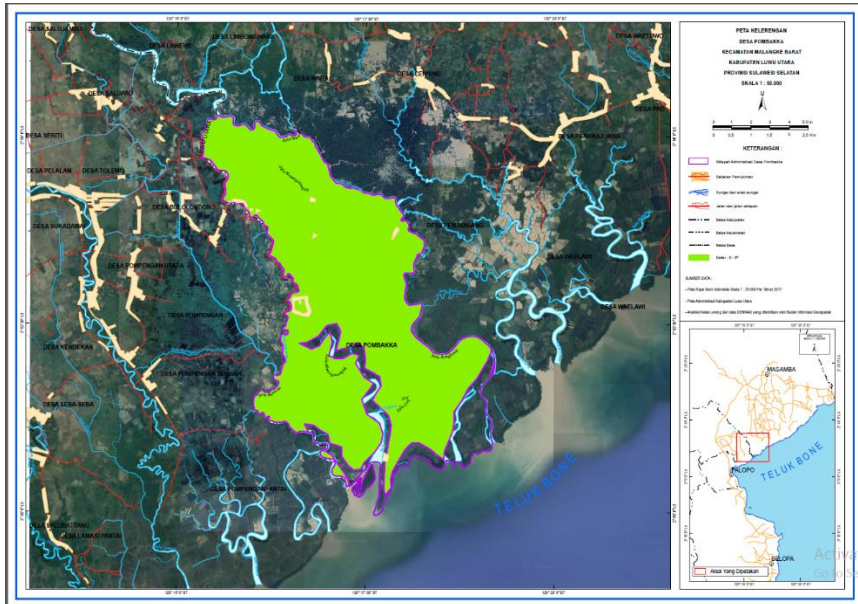
Sumber : Hasil Analisis, 2020

Sedangkan menurut Siswono, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan permukiman yang dapat dilihat dari 9 aspek, antara lain: letak geografis, kependudukan,

sarana dan prasarana, ekonomi dan keterjangkauan daya beli, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, dan peran serta masyarakat (Sumber : Siswono, dkk)

1. Faktor Geografi

Letak geografis suatu permukiman sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu kawasan. Permukiman yang letaknya terpencil dan sulit dijangkau akan sangat lambat untuk berkembang. Topografi suatu kawasan juga berpengaruh, jika topografi kawasan tersebut tidak datar maka akan sulit bagi daerah tersebut untuk berkembang. Lingkungan alam dapat mempengaruhi kondisi permukiman, sehingga menambah kenyamanan penghuni permukiman.



Gambar 7. Peta Kelas Lereng Desa Pombakka

Sumber : Hasil Analisis Data BIG, 2020

Berdasarkan peta kelas kelerengan yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial, wilayah Desa memiliki kelerengan 0 – 8°, hal ini menunjukkan bahwa pada lokasi ini sangat rawan terhadap bencana banjir.

2. Faktor Kependudukan

Perkembangan penduduk yang tinggi, merupakan permasalahan yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan permukiman. Jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya dan potensi bagi pembangunan, apabila dapat diarahkan menjadi manusia pembangunan yang efektif dan efisien. Tetapi sebaliknya, jumlah penduduk yang besar itu akan merupakan beban dan dapat menimbulkan permasalahan bila tidak diarahkan dengan baik. Disamping itu, penyebaran penduduk secara demografis yang tidak merata, merupakan permasalahan lain berpengaruh terhadap pembangunan perumahan.

3. Faktor Kelembagaan

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pembangunan perumahan adalah perangkat kelembagaan yang berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan, pembinaan, dan pelaksanaan baik sektor pemerintah maupun sektor swasta, baik di pusat maupun di daerah. Secara keseluruhan perangkat kelembagaan tersebut belum merupakan suatu sistem terpadu. Menurut UU No. 5 Tahun 1979, Pemda memegang peranan dan mempunyai posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Namun unsur-unsur perumahan di tingkat daerah yang melaksanakan program khusus untuk koordinasi, baik dalam koordinasi vertikal maupun horisontal dalam pembangunan perumahan, masih perlu dimantapkan dalam mempersiapkan aparaturnya.

Termasuk didalamnya adalah kebijaksanaan yang mengatur kawasan permukiman, keberadaan lembaga-lembaga desa, misalnya LKMD, Karang Taruna, kelompok wanita dan sebagainya.

4. Faktor Swadaya dan Peran Serta Masyarakat

Dalam rangka membantu golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, menengah, tidak tetap, perlu dikembangkan pembangunan perumahan secara swadaya masyarakat yang dilakukan oleh berbagai organisasi non-pemerintah. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap serta amat rendah dan tidak berkemampuan tersebut mampu membangun rumahnya sendiri dengan proses bertahap, yakni mula-mula dengan bahan bangunan bekas atau sederhana, kemudian lambat laun diperbaiki dengan bangunan permanen bahkan ada pula beberapa rumah yang sudah bertingkat. Faktor swadaya dan peran serta masyarakat atau aspek sosial tersebut juga meliputi kehidupan sosial masyarakat, kehidupan bertetangga, gotong royong dan pekerjaan bersama lainnya.

5. Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya merupakan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan permukiman. Sikap dan pandangan seseorang terhadap rumahnya, adat istiadat suatu daerah, kehidupan bertetangga, dan proses modernisasi merupakan faktor-faktor sosial budaya. Rumah tidak hanya sebagai tempat berteduh dan berlindung terhadap bahaya dari luar, tetapi berkembang menjadi sarana yang dapat menunjukkan citra dan jati diri penghuninya.

6. Ekonomi dan Keterjangkauan Daya Beli

Aspek ekonomi meliputi yang berkaitan dengan mata pencaharian. Tingkat perekonomian suatu daerah yang tinggi dapat meningkatkan perkembangan permukiman. Tingkat perekonomian suatu daerah akan mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin tinggi pula kemampuan orang tersebut dalam memiliki rumah. Hal ini akan meningkatkan perkembangan permukiman

di suatu daerah. Keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap suatu rumah akan mempengaruhi perkembangan permukiman. Semakin murah harga suatu rumah di daerah tertentu, semakin banyak pula orang yang membeli rumah, maka semakin berkembanglah permukiman yang ada.

7. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana dari suatu perumahan dan permukiman dapat mempengaruhi perkembangan permukiman di suatu wilayah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat memudahkan penduduknya untuk beraktivitas sehari-hari. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang tersedia maka semakin banyak pula orang yang berkeinginan bertempat tinggal di daerah tersebut.

Pola permukiman tidak terbentuk dengan sendirinya tetapi melalui proses dan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor pembentukan pola permukiman (Abdullah, 2000), yaitu; kondisi keamanan, saling membutuhkan, hubungan kelompok, politik, agama, ideologi, budaya, bentuk fisik alam, ketersediaan prasarana.

BAB 3

MANAJEMEN BENCANA BANJIR

A. Daerah Sempadan Sungai, dan Dataran Banjir

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai disebutkan bahwa sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggung sebelah dalam. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Dataran banjir (*flood plain*) adalah lahan atau dataran di kanan kiri sungai yang sewaktu-waktu bisa tergenang banjir. Sedangkan daerah dataran banjir (*flood plain area*) menurut Dirjen SDA DPU adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang elevasi muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal di daerah tersebut.

B. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah suatu peristiwa meluapnya air dari sungai atau saluran drainase karena tidak mampu menampung besarnya debit air (Dirjen SDA DPU). Sedangkan menurut pengertian umum banjir adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Peraturan Dirjen RLPS No.04 thn 2009).

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Ligal, 2008).

Banjir juga dipahami sebagai suatu aliran yang relatif tinggi yang melampaui tanggul alami atau buatan yang ada di sungai, besarnya bervariasi menurut musim, bulan ke bulan, tahun ke tahun (Chow, 1964). Banjir juga bisa dipahami sebagai debit aliran air sungai yang secara relatif lebih besar dari biasanya sebagai akibat air hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus-menerus sehingga tidak

dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Tim PKPS, 1997).

Banjir adalah suatu peristiwa alam biasa, kemudian menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia serta mengancam kepemilikan dan keselamatannya. Dampak langsung akibat banjir (Kodoatie dan Syarif, 2006) antara lain: hilangnya nyawa atau terluka, hilangnya harta benda, kerusakan kasawan pemukiman, pertanian, dan infrastruktur lainnya (perdagangan, industri, sarana transportasi, komunikasi, sistim irigasi/drainase).

Kawasan rawan bencana banjir adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir (Dirjen SDA DPU). Dilihat dari aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis (Dirjen SDA DPU), yaitu:

- 1) Banjir yang disebabkan oleh hujan yang lama, dengan intensitas rendah (hujan siklonik atau frontal) selama beberapa hari. Dengan kapasitas penyimpanan air yang dimiliki oleh masing-masing Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang akhirnya terlampaui, maka air hujan yang terjadi akan menjadi limpasan yang selanjutnya akan mengalir secara cepat ke sungai-sungai terdekat, dan meluap menggenangi areal dataran rendah di kiri-kanan sungai. Jenis banjir ini termasuk yang paling sering terjadi di Indonesia.
- 2) Banjir karena salju yang mengalir, terjadi karena mengalirnya tumpukan salju dan kenaikan suhu udara yang cepat di atas lapisan salju. Aliran salju ini akan mengalir dengan cepat bila disertai dengan hujan. Jenis banjir ini hanya terjadi di daerah yang bersalju.
- 3) Banjir Bandang (flash flood), disebabkan oleh tipe hujan konvensional dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai. Aliran air banjir dengan kecepatan tinggi akan memiliki daya rusak yang besar, dan akan lebih berbahaya

bila disertai dengan longsor, yang dapat mempertinggi daya rusak terhadap yang dilaluinya.

- 4) Banjir yang disebabkan oleh pasang surut atau air balik (back water) pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai. Kondisi ini akan menimbulkan dampak besar, bila secara bersamaan terjadi hujan besar di daerah hulu sungai yang mengakibatkan meluapnya air sungai di bagian hilirnya, serta disertai badai yang terjadi di lautan atau pantai.

Sedangkan penyebab banjir pada umumnya disebabkan curah hujan yang tinggi diatas normal, namun banjir juga bisa terjadi akibat kiriman dari hulu, bila curah hujan tinggi di hulu sungai dan sistem DAS dari sungai itu rusak maka luapan airnya akan terjadi di hilir sungai. Pada daerah permukiman dengan tingkat bangunan padat dapat mengakibatkan tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan (run off) yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya banjir.

Secara umum penyebab banjir dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002). Yang termasuk sebab-sebab alami antara lain:

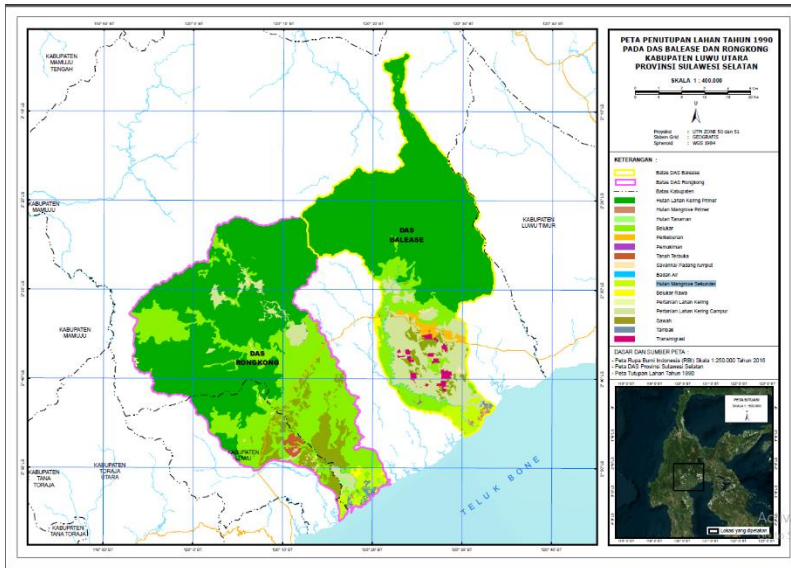
- 1) Curah hujan. Pada musim penghujan curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan.
- 2) Pengaruh Fisiografi. Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan kemiringan daerah pengaliran sungai, kemiringan sungai, bentukpenampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai,

lokasi sungai, merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir.

- 3) Erosi dan Sedimentasi. Erosi di daerah pengaliran sungai akan berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai, besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, sehingga timbul genangan dan banjir di sungai.
- 4) Kapasitas sungai. Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan yang berasal dari erosi daerah pengaliran sungai dan erosi tanggul sungai yang berlebihan serta sedimentasi di sungai karena tidak adanya vegetasi penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat.
- 5) Kapasitas Drainase yang tidak memadai. Kondisi drainase yang tidak memadai apakah dari kapasitas tampungan ataupun kondisi struktur yang rusak dapat menyebabkan terjadi genangan dan banjir.
- 6) Pengaruh air pasang. Air pasang laut memperlambat aliran sungai kelaut. Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar kerana terjadinya aliran balik (*back water*).

Yang termasuk sebab-sebab banjir karena tindakan manusia antara lain:

- 1) Perubahan Kondisi Daerah Pengaliran Sungai. Perubahan daerah pengaliran sungai seperti pengundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota dan perubahan tata guna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena aliran banjir.



Gambar 8. Peta Penutupan Lahan Kabupaten Luwu Utara

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan peta penutupan lahan 1990, bahwa wilayah DAS Rongkong pada bagian hulu masih dalam kondisi baik dengan jenis penutupan lahan yaitu hutan lahan kering primer sedangkan pada bagian hilir juga masih dalam kondisi baik dengan penutupan lahan mangrove sekunder. Pada kondisi penutupan lahan pada saat itu belum terjadi banjir bandang yang mengakibatkan banyak kerusakan karena wilayah DAS Rongkong masing dalam kondisi baik.

- 2) Kawasan Kumuh. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Perumahan kumuh yang terdapat di sepanjang sungai, dapat menjadi penghambat aliran.
- 3) Sampah. Fenomena disiplin masyarakat yang kurang baik dengan membuang sampah tidak pada tempatnya melainkan di sungai, akan dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi aliran.

- 4) Drainase lahan. Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantaran banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi.
- 5) Bendung dan bangunan air. Bendung dan bangunan lain seperti pilar jembatan dapat meningkatkan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik (back water).
- 6) Kerusakan bangunan pengendali banjir. Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir.
- 7) Perencanaan sistim pengendalian banjir tidak tepat. Beberapa sistim pengendalian banjir memang dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir-banjir besar. Sebagai contoh bangunan tanggul sungai yang tinggi. Limpasan pada tanggul pada waktu terjadi banjir yang melebihi banjir rencana dapat menyebabkan keruntuhan tanggul, menyebabkan kecepatan aliran yang sangat besar yang melalui bobolnya tanggul sehingga menimbulkan banjir yang besar.

C. Dampak dan Akibat Banjir

Banjir dapat berupa genangan ataupun limpasan, tergantung dari penyebab, kondisi geografis dan kondisi bantaran sungai. Banjir yang disebabkan oleh hujan yang berlebihan akan menimbulkan banjir limpasan dan genangan tetapi banjir yang disebabkan oleh meningkatnya permukaan air laut biasanya merupakan banjir genangan. Sedangkan banjir yang disebabkan oleh gelombang tsunami merupakan banjir limpasan gelombang yang sangat dahsyat (Lasino, 2002).

Dari kedua tipe banjir tersebut dapat mengakibatkan dampak yang berbeda pula dimana banjir limpasan dapat

menyebabkan robohnya bangunan dan terhanyutnya barang atau benda bahkan manusia akibat hantaman yang kuat dari arus air yang disertai benda yang terbawa, sedangkan banjir genangan kurang memberikan dampak kerusakan langsung secara signifikan (Lasino, 2002)

Dampak dan gangguan yang terjadi akibat genangan banjir terhadap manusia, tergantung dari sifat jenis dan kondisi lingkungan yang terkena banjir dan bagaimana masyarakat mengsikapi kejadian banjir tersebut. Secara umum pengaruh genangan banjir terhadap kehidupan manusia dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap gangguan dan tahap ancaman (Lasino, 2002) yaitu;

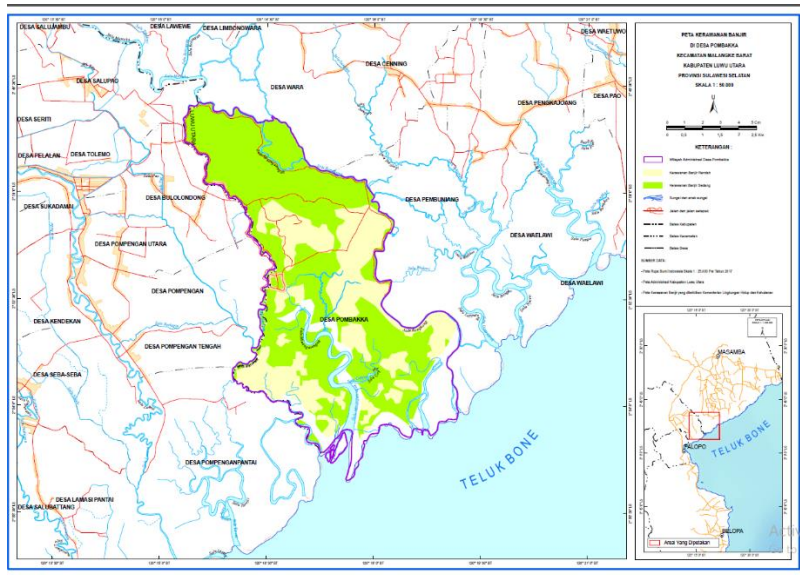
- 1) Tahap gangguan, dimana pada tahap ini masyarakat baru merasa terganggu kenyamanannya sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa atau berkurangnya fungsi rumah sebagai tempat tinggal dan pembinaan keluarga serta berkurangnya fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
- 2) Tahap ancaman, dimana pada tahap ini masyarakat sudah mulai terancam keselamatannya baik pada saat terjadinya banjir akibat derasnya aliran atau longsor yang dapat merobohkan bangunan maupun pasca banjir dengan munculnya berbagai wabah penyakit serta gangguan kesehatan lainnya.

Dampak yang lebih luas dari banjir adalah rusaknya lingkungan, yang akan berpengaruh terhadap banyak aspek kehidupan atau ekosistem yang ada. Pada lingkungan permukiman, banjir akan berakibat pada terhentinya kegiatan ekonomi dan stagnasi usaha, begitu juga dengan pendidikan akan terganggu karena siswa tidak nyaman bahkan tidak dapat belajar di sekolahnya. Selanjutnya akibat banjir juga berpengaruh kepada perdagangan karena terhentinya sistem transportasi terutama transportasi darat sehingga distribusi

barang-barang terhambat penyalurannya, selain itu banjir juga mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum yang ada, kerugian lainnya akibat yang ditimbulkan oleh kejadian banjir yaitu adanya Perubahan kondisi lingkungan yang akan berpengaruh terhadap fungsi lahan dan nilai ekonomis terutama akibat adanya genangan yang secara langsung akan mengganggu aktivitas masyarakat. Sedangkan dampak atau kerugian yang diakibatkan pasca banjir adalah dengan munculnya berbagai penyakit yang menimpa pada masyarakat seperti sesak nafas, diare, sakit kulit, dan sebagainya.

D. Mitigasi Bencana Banjir

Sudah menjadi sesuatu yang kodrati, manusia sebagai makhluk yang mempunyai insting untuk bertahan dari sesuatu yang dapat mengancam jiwa mereka dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang ada, apabila batas kemampuan yang ada pada manusia sudah terlampaui untuk bertahan dari suatu yang mengancam jiwa mereka, maka biasanya manusia akan pasrah dan menerima saja karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya atau mungkin juga manusia tersebut akan menyerah pada suatu keadaan yang mengancam sehingga mereka memutuskan untuk pindah dan mencari tempat yang baru. Sebaliknya jika manusia mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi bencana, maka manusia tersebut tentunya tetap akan bertahan di lokasi yang ia tempati walaupun rawan akan bencana dengan berbagai cara.



Gambar 9. Peta Kerawanan Banjir Desa Pombakka

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan peta kerawanan banjir, wilayah Desa Pombakka masuk dalam kategori rawan banjir. Hal ini mengingat letaknya berada di hilir Sungai Rongkong yang sering terjadi banjir terutama pada musim penghujan.

Berkaitan dengan kerawanan bencana banjir ada beberapa bentuk upaya atau cara yang dapat dilakukan baik secara individu atau oleh masyarakat maupun dalam konteks yang lebih luas yaitu secara kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi atau mengambil tindakan preventif untuk mengurangi dampak dari bencana banjir. Salah satu cara tersebut dapat dilakukan dengan cara adaptasi yang berupa berbagai tindakan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan.

Partisipasi upaya adaptasi yang dapat dilakukan secara individu atau masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana banjir, yaitu sesuai dengan Pedoman Penanggulangan Banjir Pelaksana Harian BAKORNAS Penanggulangan Bencana Tahun 2007, ada beberapa upaya antisipasi yang dapat

dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana banjir, antara lain ikut serta dan aktif dalam program desain dan pembangunan rumah tahan banjir dengan pembangunan rumah tingkat, dan penggunaan material yang tahan air dan gerusan air.

Didalam pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir Dirjen SDA Departemen Pekerjaan Umum, disebutkan salah satu cara untuk pengendalian banjir pada kawasan rawan banjir terhadap permukiman khususnya perumahan atau bangunan dengan mempersyaratkan flood proofing yang antara lain dapat dilakukan dengan cara meninggikan elevasi muka tanah, meninggikan elevasi struktur bangunan dan penggunaan bahan bangunan tahan air.

Secara lingkungan atau kewilayahan tindakan antisipasi dapat dilakukan dengan pendekatan pengendalian banjir secara teknis (struktur) (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002). Pengendalian banjir dengan metode struktur dapat dilakukan dengan membangun bangunan pengendali banjir (Kodoatie dan Sjarief, 2006) seperti:

- 1) Bendungan, digunakan untuk menampung dan mengelola distribusi aliran sungai. Pengendalian diarahkan untuk mengatur debit air sungai di sebelah hilir bendungan.
- 2) Kolam penampungan (retention basin), berfungsi untuk menyimpan sementara debit sungai sehingga puncak banjir dapat dikurangi.
- 3) Tanggul penahan banjir, penghalang yang didesain untuk menahan air banjir di palung sungai untuk melindungi daerah di sekitarnya.
- 4) Saluran by pass (sudetan), saluran yang digunakan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aliran air banjir dalam rangka mengurangi debit banjir pada daerah yang dilindungi.

- 5) Sistem peningkatan kapasitas sungai dengan pelebaran atau pengerukan alur sungai, bertujuan untuk memperbesar kapasitas tampung sungai dan memperlancar aliran
- 6) Sistem drainase khusus, untuk memindahkan air dari daerah rawan banjir karena drainase yang buruk secara alami atau karena ulah manusia.

E. Kearifan Lokal Masyarakat

Kearifan lokal merupakan pemahaman kolektif, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mempengaruhi keputusan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah kehidupan. Kearifan lokal pada hal ini merupakan seperangkat pemahaman dan pengetahuan yang mengalami proses perkembangan oleh suatu kelompok masyarakat setempat atau komunitas yang terhimpun dari proses pengalaman panjang dalam berinteraksi dan bertindak dalam satu sistem dan dalam satu ikatan hubungan yang saling menguntungkan (Suparmni, Setyawati, Sumunar, 2014 dalam Marfai, 2012 : 33).

Kemampuan adaptasi masyarakat Desa Pombakka dapat diilustrasikan dalam bentuk setting budaya yang tidak mudah mengalami perubahan dan pergeseran kebudayaan, selain dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat, kemampuan adaptasi juga dipengaruhi oleh keberadaan dan ancaman bencana dan ketersediaan sumber daya lokal. Kemampuan masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana tidak terlepas dari kajian-kajian budaya dan kearifan lokal serta kemampuan adaptasi masyarakat. Masyarakat tradisional pada umumnya telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kearifan lokal yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan adaptif terhadap lingkungan mempunyai peranan penting dalam pengurangan resiko bencana. Yang mana kearifan

lokal disini memiliki fungsi sebagai mitigasi bencana alam terhadap bencana alam. Terlepas dari semua itu, jika dalam setiap komunitas, terutama yang berada di daerah rawan bencana, mempunyai model kebijakan penanggulangan bencana secara integratif yang berbasis kearifan budaya lokal untuk pengurangan resiko bencana maka kesadaran masyarakat akan semakin tinggi terhadap ancaman bencana.

Jika kesadaran tinggi dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana cukup kuat, maka kerentanan semakin kecil. Pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana memerlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Sehingga mitigasi bencana berbasis kearifan lokal sangat diperlukan dalam rangka meminimalisir dampak negatif dari bencana alam yang terjadi, sekaligus sebagai bentuk totalitas tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Paradigma definisi sosial merupakan paradigma yang mana perkembangan dari suatu hubungan sosial dapat pula diterangkan melalui tujuan - tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial itu dimana ketika ia mengambil manfaat dari tindakannya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mana peneliti mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut dan teori menggunakan teori tindakan sosial yang di kemukakan oleh Max Weber. Individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial.

Menurut Weber bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial sehingga dapat dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial. Max Weber berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain.

Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau in order to motive. interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan - pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang di tujukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki makna subjektif bagi dan dari aktor pelakunya.

Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentudan makna tertentu.

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, yang pertama, tindakan rasionalitas instrumental merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

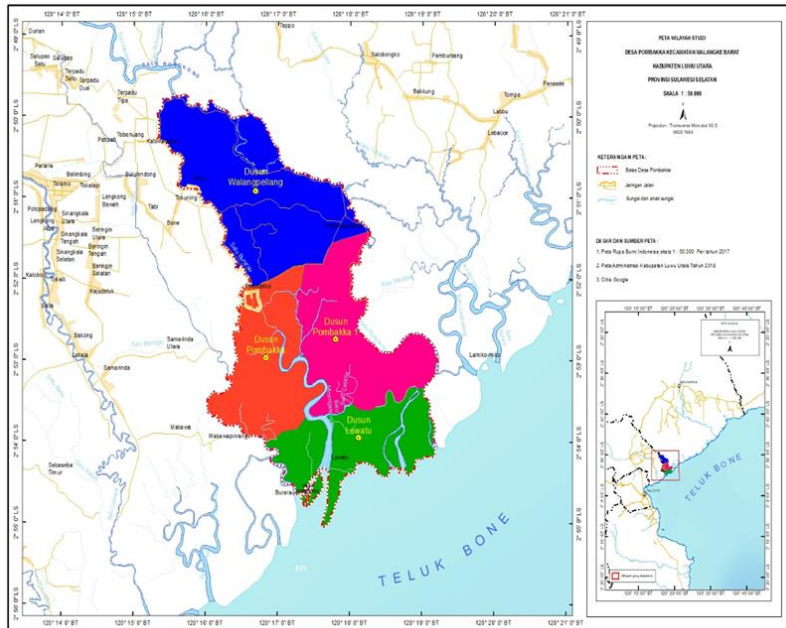
Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain. Yang kedua, tindakan rasional nilai merupakan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Yang mana tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki. Yang ketiga, tindakan afektif merupakan lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Yang keempat, tindakan tradisional merupakan tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

BAB 4

STUDI POLA BERMUKIM MASYARAKAT DI KAWASAN RAWAN BANJIR

A. Kawasan Permukiman Sempadan Sungai

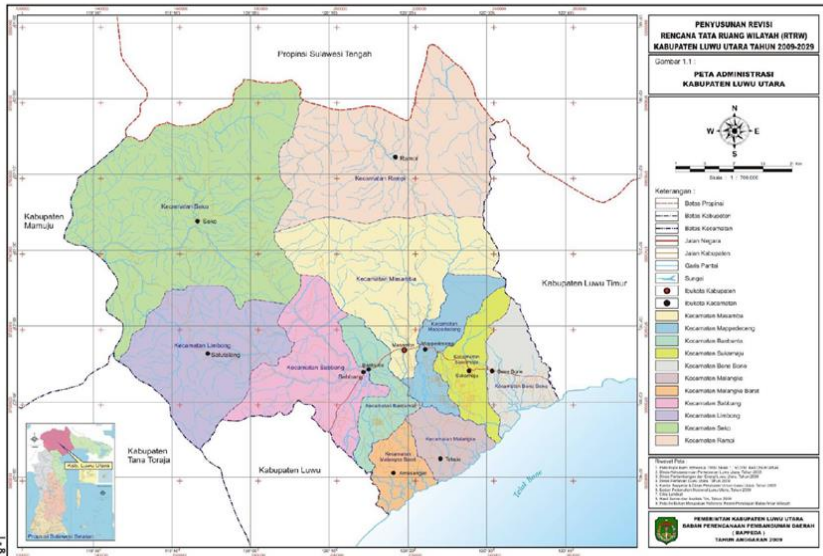
Ruang lingkup wilayah penelitian adalah kawasan permukiman daerah rawan banjir di hilir Sungai Rongkong yang secara administratif terletak di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang setiap tahun mengalami dampak banjir akibat meluapnya aliran Sungai Rongkong. Lokasi penelitian tersebut terbagi atas empat dusun yaitu Dusun Welangpellang, Dusun Lawatu, Dusun Pombakka I dan Dusun Pombakka II, selanjutnya lokasi dapat digambarkan seperti tampak dalam gambar peta pada Gambar 1.2



Gambar 1. Peta Wilayah Studi Desa Pombakka Kecamatan Malange Barat

Sumber : Peta Administrasi Kab. Luwu Utara, 2020

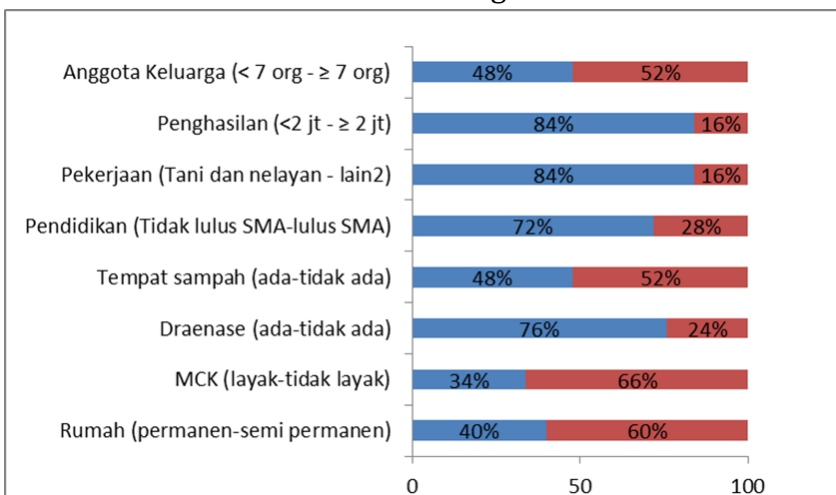
Secara administrasi pemerintahan kecamatan, wilayah Kabupaten Luwu Utara terbagi kedalam 15 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Baebunta, Bone-Bone, Rongkong, Malange Barat, Malange, Mappedeceng, Masamba, Rampi, Sabbang, Seko, Sukamaju, Tana Lili, Sukamaju Selatan, Baebunta Selatan, Sabbang Selatan sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara

Sumber : Bappeda Kab. Luwu Utara, 2020

Hasil yang diperoleh dari deskripsi elemen permukiman pada masyarakat yang bermukim pada daerah rawa banjir di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:



Gambar Kondisi Elemen Permukiman Masyarakat Desa Pombakka

Sumber : Hasil Analisis, 2020

B. Fisik Rumah dan Permukiman

1) Jenis Rumah tinggal

Berdasarkan data hasil kuisisioner terhadap 50 orang responden bahwa bentuk-bentuk rumah dimiliki oleh masyarakat yaitu jenis permanen dan semi permanen. Terdapat 30 orang responden atau 60 % yang memiliki jenis rumah semi permanen sedang 20 orang atau sebesar 40 % yang memiliki rumah permanen. Jenis rumah permanen biasanya memiliki jaringan air bersih dan MCK berada dalam rumah atau menyatu dengan bangunan rumah sedangkan rumah jenis permanen memiliki jaringan air bersih dan MCK berada diluar rumah atau tidak menyatu dengan bangunan rumah, biasanya menggunakan fasilitas jaringan air dan MCK umum yang dibangun oleh pemerintah.

2) Model Rumah

Bentuk rumah yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Pombakka menyesuaikan bentuknya dengan kondisi alam yang rawan bencana banjir. Berdasarkan data kuisisioner yang diisi oleh responden sebanyak 50 orang didapatkan data bentuk rumah panggung / bertingkat sebanyak 32 rumah atau sebesar 64 persen sedangkan 18 rumah atau sebesar 36 % rumah tidak berbentuk panggung. Berdasarkan pengamatan dilapangan saat terjadi banjir bahwa rumah berbentuk panggung aman saat terjadi banjir, barang perabot rumah tangga diamankan ke tempat yg lebih tinggi.

3) Letak Rumah

Berdasarkan data kuisisioner serta pengamatan peneliti di lapangan, umumnya masyarakat membangun rumah tepat dipinggir sungai. Hal ini dilakukan karena aliran sungai dijadikan sebagai sarana transportasi, perahu milik masyarakat dapat disimpan didekat rumah. Selain aliran

sungai difungsikan sebagai sarana mandi dan cuci yang mudah dimanfaatkan. Terdapat juga Sebagian masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat membuang sampah rumah tangga. Berdasarkan data kuisisioner yang diperoleh dari responden, terdapat 31 orang responden atau sebesar 62 % orang membangun rumah dipinggir sungai, sedangkan sisanya membangun rumah mendekati lahan usaha seperti sawah maupun lahan pertanian.

4) Kondisi Fasilitas

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan, ditemukan kondisi fasilitas sekolah yang kurang memadai karena Gedung sekolah sering terdampak banjir terutama pada musim penghujan yang mengakibatkan aktifitas belajar mengajar diliburkan sementara waktu sambil menunggu kondisi Kembali membaik. Demikian pun dengan fasilitas Kesehatan, terdapat 1 Unit Puskesmas Pembantu dengan kondisi yang juga sama kurang memadai karena sering terdampak banjir. Fasilitas Kesehatan yang lebih memadai yaitu terdapat di pusat Kecamatan Malangke Barat dimana terdapat 1 unit Puskesmas.

C. Sarana Prasarana Permukiman

1) Jaringan air dan MCK.

Syarat air bersih adalah syarat air bersih secara bersih secara fisik, kimia dan bebas dari bakteri. Secara fisik, air bersih adalah air yang tidak berwarna dan tidak berbau. Secara kimia adalah air tidak mengandung bahan kimia beracun yang dapat berbahaya bagi tubuh manusia dan secara bakteriologis adalah air tidak mengandung bakteri bakteri yang dapat berbahaya bagi tubuh manusia apabila digunakan untuk mandi maupun diminum. Berdasarkan kuisisioner yang diisi oleh responden serta hasil pengamatan dilapangan, bahwa wilayah desa Pombakka tidak terdapat

jaringan air PDAM. Untuk kebutuhan air minum masyarakat membuat sumur untuk digunakan bersama sama atau ada juga yang membuat sendiri disekitar rumahnya. Sedangkan untuk keperluan mandi dan cuci umumnya masyarakat menggunakan aliran sungai yang terletak didekat permukiman.

Berdasarkan data kuisisioner diperoleh data bahwa terdapat 33 orang responden atau sebesar 66 % yang menggunakan aliran sungai sebagai tempat MCK sedangkan sebanyak 17 orang responden atau sebesar 34 % yang membuat fasilitas MCK dalam rumah atau disamping rumah yang dibangun menyatu dengan bangunan utama.

2) Jaringan Jalan dan Transportasi

Karena wilayah Desa Pombakka yang terletak di hilir Sungai Rongkong maka jauh dari jalan provinsi maupun kabupaten. Jaringan jalan yang terdapat disana adalah jalan lingkungan dan jalan desa yang menghubungkan dengan desa lain. Kondisi dalam belum ada yang diaspal, baru sebatas pengerasan dan jalan tanah. Melihat kondisi jalan ditemukan dalam kondisi rusak terutama pada musin penghujan karena Sebagian tergenang air. Sebagian juga berlubang dan berlumpur sehingga perlu segera diperbaiki oleh pemerintah. Dengan kondisi jalan yang buruk tersebut maka wilayah desa Pombakka tidak ada angkutan umum yang melayani masyarakat setempat. Sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas serta memasarkan hasil usahanya adalah perahu dan ojek, Sebagian pula dengan jalan kaki untuk mencapai lokasi yang dapat dilayani oleh transportasi mobil yang terdapat di pusat Kecamatan Malangke Barat atau ke Lamasi.

3) Jaringan Listrik

Kebutuhan listrik di wilayah Desa Pombakka sudah dilayani oleh jaringan listrik PLN. Dengan adanya jaringan listrik

tersebut maka dapat mendukung aktifitas kebutuhan rumah tangga masyarakat. Disamping itu masyarakat sudah dapat menikmati hiburan televisi dan radio karena sudah terdapat jaringan listrik. Dari hasil kuisisioner diketahui bahwa seluruh responden sebanyak 50 orang sudah memiliki jaringan listrik dalam rumahnya.

4) Persampahan dan Limbah

Berdasarkan hasil kuisisioner dan pengamatan lapangan, diperoleh data bahwa sistim persampahan dan pembuangan limbah rumah tangga di lokasi penelitian adalah buruk. Masyarakat umumnya membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung kedalam sungai yang dapat mengakibatkan tercemarnya air sungai tersebut. Tidak terdapat tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah setempat. Sampah rumah tangga dikumpulkan dalam wadah penampungan seperti ember atau kaleng cat bekas lalu selanjutnya dibuang ke dalam sungai atau di bakar disekitar pekarangan rumah yang dapat mengganggu kualitas udara disekitarnya. Berdasarkan data kuisisioner terhadap 50 orang responden, terdapat 26 orang atau sebesar 52 % responden membuang sampah kedalam sungai atau got sedangkan sebanyak 24 orang responden atau sebesar 48 % responden menyediakan tong sampah dekat rumahnya lalu selanjutnya dibuang ke dalam sungai.

D. Lingkungan Rumah Tinggal Masyarakat

1) Iklim dan Topografi.

Iklim di Desa Pombakka termasuk iklim tropis, suhu udara minimum 25,30 0C dan suhu maksimum 27,90 0C dengan kelembaban udara rata-rata 83 %. Menurut pencatatan Stasiun Pengamatan (SP) Bone-Bone secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 9 hari dengan jumlah curah hujan

76. Stasiun Pengamatan Amasangan mencatat secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 8 hari dengan curah hujan 226 Mm. Sedangkan berdasarkan Stasiun Pengamatan Malangke secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah curah hujan 247 Mm, dan Stasiun Pengamatan Sabbang mencatat bahwa secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 14 hari dengan jumlah curah hujan 256 Mm.

Desa Pombakka merupakan daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian sekitar 150 m dengan topografi berkisar antara 0 – 8^o, selain itu tekstur tanahnya lampungan/pasir berwarna hitam, merah, kuning dan abu-abu.

2) Ketersediaan SDA.

Berdasarkan data morfologi, potensi sumberdaya alam yang terdapat di wilayah Desa Pombakka yaitu lahan Garapan berupa sawah, kebun sawit, kebun kakao, tambak ikan bandeng dan udang serta potensi laut yang cukup tersedia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) DAS Rongkong

Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Desa Pombakka terletak didataran rendah dihilir Sungai Rongkong. Karena letaknya yang rendah maka wilayah ini rawan bencana banjir terutama pada musim penghujan yang mengakibatkan kerusakan permukiman sehingga warga mengungsi ke tempat yang aman, kerusakan lahan garapan berupa sawah dan tambak sehingga masyarakat gagal panen. Selain itu fasilitas umum dan fasilitas sosial juga menjadi rusak seperti jalan terendam air, jembatan penghubung antar kampung rusak sehingga sistem transportasi terputus. Namun disisi lain aliran Sungai Rongkong dijadikan oleh warga sebagai sarana transportasi

yaitu dengan menggunakan perahu sebagai alat angkut manusia maupun alat angkut hasil usaha untuk di bawa ke Kota Masamba atau Kota Palopo.

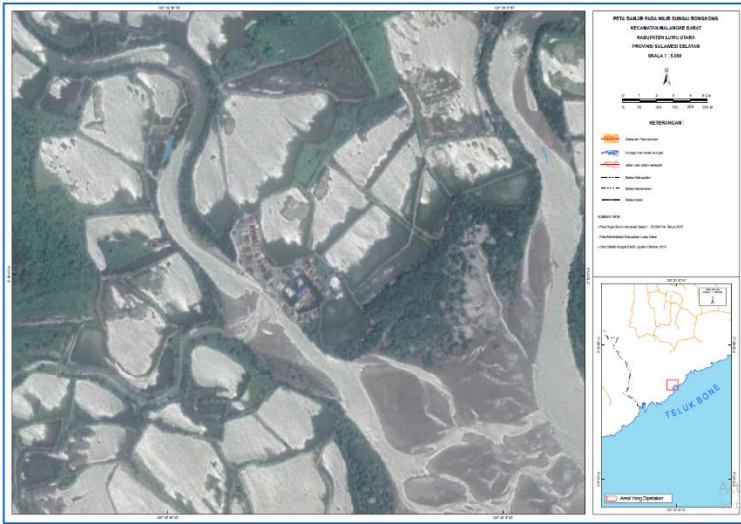
4) Pesisir Pantai

Tipologi kehidupan masyarakat dipesisir pantai yang tinggal didaerah dataran rendah pada umumnya adalah usaha budidaya tambak dan bekerja sebagai nelayan. Demikianpun warga masyarakat Desa Pombakka umumnya sebagai petani tambak dan bekerja sebagai nelayan. Wilayah Desa Pombakka yang terletak dihilir Sungai Rongkong berpotensi terdampak bencana banjir maupun pasang air laut yang setiap saat terjadi dan mengancam keberadaan permukiman masyarakat.



Gambar : 10 Kondisi Permukiman Saat terjadi Banjir

Sumber : *Google Earth* Liputan April 2020.



Gambar 11 Kondisi Permukiman Saat Tidak Terjadi Banjir
 Sumber : *Google Earth* Liputan Agustus 2018

E. Kapasitas Ekonomi Masyarakat

1) Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat suatu wilayah turut mempengaruhi pemilihan pola permukiman yang hendak dikembangkan untuk suatu hunian. Berdasarkan data kuisisioner dari 50 orang responden diperoleh hasil yaitu sebanyak 36 orang responden atau sebesar 72 % responden memiliki tingkat Pendidikan tidak tamat SMA sedangkan terdapat 14 orang atau sebesar 28 % responden memiliki tingkat pendidikan tamat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pombakka masih rendah.

2) Mata Pencaharian

Berdasarkan data kuisisioner dari 50 orang responden diperoleh data tentang jenis mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Pombakka sebagai sumber mata pencaharian utama. Terdapat 42 orang responden atau sebesar 84 % responden yang bekerja

sebagai petani dan nelayan sedangkan 8 orang atau 16 % responden bekerja pada sector lain. Hal ini menunjukkan mayoritas masyarakat Desa Pombakka bekerja pada sector petanian dan nelayan, hal sesuai dengan karakteristik wilayah desa yang berada pada dataran rendah di pesisir pantai tepatnya di hilir Sungai Rongkong.

3) Jumlah Penduduk

Kependudukan merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk di Desa Pombakka sebagai data yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara sebagaimana table berikut :

**Tabel 5 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin
Kec. Malangke Barat**

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1	Pombakka	1.895	411	973	922
2	Waelawi	1.141	232	577	564
3	Pengkajoang	2.270	506	1.122	1.148
4	Pao	2.501	553	1.225	1.276
5	Waetuwo	2.147	480	1.042	1.105
6	Arusu	3.036	678	1.477	1.591
7	Pembuniang	530	108	276	254
8	Cenning	3.206	698	1.615	1.591
9	Wara	2.017	461	1.056	962
10	Limbong Wara	307	92	162	145
11	Kalitata	1.582	372	825	757
12	Pole Jiwa	787	205	390	397
13	Baku Baku	2.883	652	1.437	1.446
		24.302	5.448	12.177	12.158

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Desa Pombakka pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.895 jiwa (411 rumah tangga) yang terdiri dari 973 jenis kelamin laki-laki dan 922 jenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk terkait dengan jumlah

penduduk dan luas daerah, sedangkan jumlah penduduk itu sendiri dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang datang dan pergi dari suatu daerah, tingkat kelahiran dan kematian.

4) Budaya

Terdapat tradisi kearifan local yang tumbuh dan berkembang ditengah tenag masyarakat yaitu tradisi makan bersama dinamakan Tudang Sipulung atau kumpul bersama sementara Manre Saperra adalah makan bersama atau berpesta Tudang Sipulung dan Manre Saperra adalah bentuk syukuran masyarakat atas keberhasilan dalam mengelola hasil bumi, serta terealisasinya program pembangunan pemerintah yang telah masuk di daerah tersebut, dimana selama ini infrastruktur perdesaan yang mendukung pengelolaan hasil bumi sangat lamban. Tudang Sipulung Manre Saperra sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kerja sama bahu membahu membangun desa, tradisi ini merupakan bentuk kearifan local yang ditunjukkan oleh masyarakat dengan merawat kebiasaan-kebiasaan sebagai bentuk syukur warga atas hasil panen dan program pemerintah yang telah masuk di desa mereka.

F. Kondisi Sosial Masyarakat

1) Agama

Berdasarkan data kuisisioner yang diperoleh dari 50 orang responden di Desa Pombakka, diketahui bahwa terdapat 40 Orang atau sebesar 80 % responden yang memeluk Agama Islam. Sisanya 10 orang atau 20 % responden yang memeluk agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa memeluk Agama Islam sehingga pada hari hari besar keagamaan Islam seperti Idhul Fitri masyarkat merayakannya sehingga pada hari hari tersebut kegiatan di lahan usaha dihentikan sementara karena masyarakat

menggunakan waktu untuk saling mengunjungi keluarganya.

2) Pendapatan

Berdasarkan hasil hasil kuisioner yang diisi oleh responden sebanyak 50 orang, pendapatan hasil usaha masyarakat bervariasi sesuai dengan jenis pekerjaan, luas lahan Garapan dan status lahan garapannya. Tingkat pendapatan masyarakat responden yaitu kurang dari < Rp.2.000.000 sebanyak 42 orang responden atau sebesar 84 %. Sedangkan masyarakat responden dengan pendapatan lebih dari Rp.2.000.000,- sebanyak 8 orang respon atau sebesar 8 %. Pendapatan yang dimaksud adalah nilai hasil usaha setelah dikurangi seluruh komponen biaya produksi.

3) Fasum/Fasos

Kondisi fasilitas umum dan fasilitas social di wilayah Desa Pombakka tidak optimal berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu contoh Banguna Mesjid yang sudah lama terendam banjir sehingga tidak bisa lagi difungsikan. Sarana dan prasarana MCK yang dibangun oleh pemerintah tidak dirawat dengan baik, saluran air pembuangan macet sehingga masyarakat enggan lagi menggunakannya.



Gambar 12. Fasilitas Umum / Masjid yang tidak digunakan

Sumber : Dokumentasi Hasil Observasi, 2020

Permukiman adalah sebagai salah satu sarana hunian yang sangat erat kaitannya dengan tata cara kehidupan masyarakat. Lingkungan permukiman merupakan suatu daerah hunian yang perlu dilindungi dari gangguan-gangguan seperti gangguan suara, kotoran udara, bau dan lain-lain.

BAB 5

ANALISIS POLA PERMUKIMAN MASYARAKAT YANG BERMUKIM DI LOKASI RAWAN BENCANA BANJIR

A. Analisa Elemen Bangunan (Shells) Kondisi Fisik Rumah dan Permukiman

1. Penguasaan Tempat Tinggal

Hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yaitu anggota masyarakat yang bermukim di lokasi rawan bencana banjir yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun yaitu Dusun Welangpellang, Dusun Lawatu, Dusun Pombakka 1 dan Dusun Pombakka 2 maka temuan yang didapati yaitu tanah untuk permukiman masyarakat baik berupa tanah tempat membangun perumahan maupun tanah lahan usaha berupa sawah maupun tambak di lokasi rawan bencana banjir umumnya berasal dari pemberian orang tua merupakan tanah warisan yang sudah dikelola secara turun temurun dan sebagian penguasaan tempat tinggal dan lahan usaha diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat yang lebih dulu bermukim di Desa Pombakka.

Masyarakat yang menguasai lahan sejak awal mula merupakan warga transmigrasi ditempatkan oleh pemerintah pada akhir Tahun 1970 untuk membuka lahan yang masih berupa hutan rawa. Mereka membuka lahan untuk kegiatan pertanian dan tambak. Sedangkan masyarakat yang menguasai lahan dengan cara membeli ada warga yang datang belakang ke Desa Pombakka namun karena tidak tersedia lagi lahan permukiman maupun lahan usaha yang kosong maka mereka membeli kepada masyarakat yang datang sejak awal mula.

2. Kondisi Fisik Bangunan

Hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden dan survei lapangan yaitu anggota masyarakat yang bermukim di lokasi rawan bencana banjir yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun yaitu Dusun Welangpellang, Dusun Lawatu, Dusun Pombakka 1 dan Dusun Pombakka 2 maka temuan yang didapati yaitu mengenai keadaan atau kondisi bangunan rumah tinggal masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kondisi rumah masyarakat pada lokasi rawan banjir pada umumnya berada pada keadaan tidak beraturan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi, namun mayoritas berada pada kondisi berkekurangan. Kondisi fisik bangunan rumah tinggal masyarakat di lokasi rawan banjir sebenarnya merepresentasikan karakter penghuni dan kemampuan finansialnya.

Sebanyak 40 % kondisi fisik bangunan rumah tinggal masyarakat yang bermukim dilokasi rawan banjir Pombakka pada 4 (empat) dusun dalam keadaan baik yang seluruh fisik bangunannya terbuat dari beton yang permanen, sedangkan terdapat 60 % kondisi fisik bangunan rumah tinggal masyarakat yang bermukim dilokasi rawan banjir Desa Pombakka dalam keadaan kurang baik. Kondisi bangunan bervariasi yaitu bangunan semi permanen yang mana setengah dari bangunan tinggal terbuat dari beton dan setengahnya terbuat dari kayu serta ada juga bangunan fisik terbuat seluruhnya dari kayu yang tidak layak huni.

Dilihat dari kondisi struktur konstruksi bangunan, permukiman petani yang ada cenderung menggunakan struktur-konstruksi non/semi permanen yaitu terbuat dari kayu. Namun karena lahan yang tersedia dilokasi ini masih cukup luas sehingga pekarangan rumah masih tersedia sangat memadai untuk beraktifitas diluar rumah.



Gambar 13. Keadaan Permukiman Desa Pombakka

Sumber : Dokumentasi Hasil Observasi, 2020

Berdasarkan temuan ini pada gambar diatas terhadap kondisi rumah tinggal adalah petani tambak penggarap yang ada di lokasi penelitian ini umumnya sebagian rumah tidak layak huni dan tidak memenuhi standart rumah sehat yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, terutama rumah petani yang berada dekat dengan aliran sungai hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya kemampuan finansial mereka untuk membangun rumah yang sehat walaupun mereka mempunyai tanah untuk lokasi pembangunan rumah.

Namun terdapat juga pemukiman yang kondisi fisik sudah memadai sebagai sebuah rumah layak tinggal. Salah satu responden rumah pemilik yang diambil oleh peneliti yaitu rumah keluarga Mukhtar luas rumah pada gambar adalah $7 \text{ m} \times 11 \text{ m} = 77 \text{ m}^2$. Kondisi rumah tempat tinggalnya keadaannya jauh lebih baik. Ketika melakukan observasi dilapangan dapat dilihat sebagian besar kondisi fisik bangunan, fasilitas dan perlengkapan, serta kondisi lingkungan mendapat perawatan dan pemeliharaan cukup baik. Dilihat dari kondisi struktur

konstruksi bangunan, permukiman petani tambak ini cenderung menggunakan struktur konstruksi bangunan permanen yang terbuat dari beton.



Gambar 14. Keadaan Permukiman Desa Pombakka

Sumber : Dokumentasi Hasil Observasi, 2020

Salah satu sampel rumah penggarap tambak yang diambil oleh peneliti yaitu rumah keluarga Bapak Yunus, luas rumah pada gambar ini adalah $8 \times 11 = 88 \text{ m}^2$. Dilihat dari kondisi struktur konstruksi bangunan, permukiman penggarap tambak sekaligus sebagai nelayan yang ada di lokasi penelitian ini menggunakan struktur-konstruksi rumah panggung permanen yang dibangun dari kayu tepat berada dipinggir sungai untuk memudahkan menyimpan perahu.



Gambar 15. Keadaan Permukiman Responden di Desa Pombakka

Sumber : Hasil Observasi, 2020

Berdasarkan temuan ini dilapangan sebagaimana tampak pada gambar diatas terhadap kondisi rumah tinggal masyarakat yang bermukim dilokasi rawan banjir di lokasi penelitian ini umumnya sebagian rumah penggarap tambak yang sekaligus bekerja sebagai nelayan memiliki rumah yang layak huni. Kondisi rumah dibangun bentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu sehingga apabila terjadi banjir maka rumah tersebut tidak tergenang. Rumah tersebut layak huni yang memenuhi standart rumah sehat yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, terutama rumah masyarakat yang berada dekat dengan tepi sungai hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya kemampuan finansial mereka untuk membangun rumah yang sehat dan memadai.

Berdasarkan temuan dilapangan kondisi rumah tinggal responden sudah layak huni dan sudah memenuhi standart rumah sehat yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, yaitu sudah memiliki rumah yang dilengkapi dengan sarana MCK, sumber air bersih, sumber penerangan sendiri. Doxiadis (1967) menjelaskan bahwa suatu permukiman dinilai baik jika dapat

memberikan kebahagiaan dan keselamatan pada manusia. Pemikiran ini berbanding terbalik dengan keadaan kondisi rumah responden yang tidak layak huni. Kondisi rumah yang tidak sehat menjadikan rumah tinggal responden sebagai rumah tidak layak huni salah satunya karena tidak dapat memenuhi kebutuhan psikologis sehingga tidak memberi rasa bahagia, rasa aman dan rasa nyaman bagi anggota keluarganya.

B. Analisa Elemen Sarana Prasarana (Network) Kondisi Fasilitas dan Perlengkapan Sarana Permukiman

Hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yaitu masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan banjir di Desa Pombakka maka temuan yang didapati yaitu mengenai Fasilitas Tempat Mandi dan Fasilitas Buang Air Besar (MCK).

Dari data yang ada dapat dikemukakan bahwa dari 50 responden 33 orang atau sebesar 66 % responden petani yang menggunakan MCK umum atau membuang air langsung ke sungai karena umumnya tidak memiliki MCK sendiri dalam rumah serta letak permukiman masyarakat berada di pinggir sungai. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kemampuan finansial ekonomi respon untuk membangun sendiri MCK dalam rumah. Sedangkan sebanyak 17 orang responden atau sebesar 34 % responden petani yang memiliki fasilitas tempat mandi dan MCK dalam rumah sendiri yang dibangun menyatu dengan bangunan rumah tinggal atau dibangun terpisah dari rumah tinggal namun masih berada di samping rumah dan menyatu dengan bangunan induk dan merupakan milik pribadi yang tidak dimanfaatkan secara umum bersama masyarakat yang lain.

Keberadaan prasarana sanitasi (MCK umum) ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang tidak memiliki MCK dalam rumah yaitu masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Terdapat 2 unit prasarana

penunjang permukiman seperti prasarana sanitasi (MCK umum) yang sudah disediakan oleh pemerintah desa. Tapi sayangnya tidak berfungsi dengan baik karena kurangnya pemeliharaan dan perilaku masyarakat yang taunya saja memakai namun tidak memiliki rasa kepedulian untuk merawat misalnya jaringan air dalam MCK umum tersebut tidak berfungsi lagi (air tidak mengalir) sehingga ruangan MCK berbau sehingga masyarakat enggan lagi untuk menggunakannya, Closet tidak berfungsi lagi karena tersumbat oleh kotoran sehingga warga enggan lagi menggunakannya. Selain itu, ada juga yang dibangun diatas tanah milik perorangan dan setelah mereka melakukan penambahan atau renovasi rumah tinggalnya prasarana sanitasi (MCK umum) itu dijadikan hak milik pribadi oleh yang bersangkutan. Akibat tidak berfungsinya lagi prasarana mandi dan buang air besar maka masyarakat menggunakan sungai sebagai tempat mandi dan buang air besar.

Menurut Doxiadis (1986), manusia memanfaatkan sesuatu dari alam dan sudah seharusnya manusia menjaga alam. Hal ini harus didukung dengan pola hidup sehat dari masyarakat dengan kesadaran akan menjaga lingkungan sekitar dan kebiasaan untuk tidak mencemarinya, sehingga terwujud permukiman yang sehat dan memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.



Gambar 16. Kondisi Fasilitas MCK Umum

Sumber : Dokumentasi Observasi Lapangan, 2020

Kondisi-kondisi diatas menunjukkan bahwa permukiman petani penggarap tambak di lokasi rawan banjir pada Desa Pombakka masuk dalam kategori permukiman yang tidak layak huni. Aktivitas fisik yang di amati oleh peneliti pada saat dilapangan dapat disimpulkan bahwa berkembangnya permukiman penggarap tambak menjadi permasalahan permukiman yang cukup serius. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi-kondisi yang bersifat fisik dan non fisik pada kawasan permukiman masyarakat.

Sedangkan untuk anggota keluarga pemilik tambak dengan penghasilan yang cukup mampu membangun permukiman yang layak dan memadai serta dilengkapi dengan fasilitas MCK dalam rumah sendiri atau disamping rumah yang masih menyatu dengan bangunan induk, maka kondisi yang baik ini membuat mereka lebih memiliki kesadaran akan menjaga lingkungan serta memiliki pola hidup yang baik.

C. Analisa Elemen Alam (Nature) Kondisi Lingkungan Rumah Tinggal Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yaitu masyarakat yang bermukim dilokasi rawan banjir di Desa Pombakka maka temuan yang didapati yaitu mengenai cara pembuangan limbah (sistem drainase lingkungan) dan cara pembuangan sampah.

1. Cara Pembuangan Limbah (Sistem Drainase) Lingkungan

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden sebanyak 50 orang diperoleh data sebanyak 50 orang responden atau sebesar 76 % responden menjawab tidak ada got/saluran di sekitar lingkungan rumah tinggal. Kalaupun ada, ukuran saluran sangat kecil dan tidak memenuhi standar untuk menerima aliran air kotor (air hujan dan limbah air MCK) apalagi dibarengi dengan penyalagunaan saluran oleh masyarakat yaitu untuk tempat pembuangan sampah sehingga menyebabkan saluran yang ada tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya.

Sama halnya dengan jawaban yang dikemukakan oleh 24 % responden, menjawab mereka memiliki saluran terbuka dan saluran tertutup yang dibuat secara swadaya maupun melalui program pemerintah desa, namun karena keadaan air pada saluran mengalir sangat lambat dan kadang sering tergenang ditambah lagi pada saat terjadi banjir yang mengakibatkan saluran drainasi tidak berfungsi dengan baik.

Dari hasil penelitian diatas maka temuan yang didapat mengenai sistem drainase lingkungan rumah tinggal masyarakat di Desa Pombakka dapat dikatakan sangat buruk karena tidak terdapat drainase saluran pembuangan air kotor yang berasal dari aktifitas rumah tangga. Akibat tidak tersedianya saluran drainase yang layak dan memadai mengakibatkan genangan air terutama pada musim penghujan, hal ini dapat diperparah juga

karena Sebagian warga masyarakat membuang sampah kedalam got yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air tersebut.

2. Sarana Pembuangan Sampah

Berdasarkan data hasil kuisioner terhadap 50 orang responden didapatkan data tentang cara pembuangan sampah rumah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pombakka.

Dari data yang ada dapat dikemukakan bahwa dari 50 orang responden ada sebanyak 26 orang responden atau sebesar 52 % responden langsung membuang sampah rumah tangga ke sungai atau saluran air, tidak tersedianya tong sampah dan letak tempat pembuangan sementara (TPS) yang disediakan oleh pemerintah desa di lingkungan permukiman jauh tempatnya. Kebiasaan membuang sampah di sungai dan saluran air karena letak rumah tempat tinggal masyarakat dekat dengan sungai maka masyarakat menjadikan sungai dan saluran air sebagai tempat penampungan sampah bekas pakai dari rumah tangga mereka. Sedangkan sebanyak 24 orang responden atau sebesar 48 % menjawab bahwa mereka menyediakan tong sampah dekat rumahnya untuk menampung barang-barang bekas pakai dalam rumah tangga, wadah penampungan sampah biasanya menggunakan ember bekas atau kaleng cat yang sudah tidak dipakai.

Apabila wadah penampungan sampah tersebut penuh maka kebiasaan masyarakat membuang ke sungai yang terletak didekat pemukiman atau ada juga warga masyarakat yang membakar sampah disekitar tempat tinggalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sarana pembuangan sampah masyarakat pada kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka sangat buruk.

D. Analisa Elemen Manusia (MAN) Kapasitas Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada 50 responden yaitu masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan banjir di Desa Pombakka pada Desa Pombakka maka temuan yang didapati yaitu kapasitas ekonomi masyarakat.

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Pombakka

Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk elemen *Man* dalam permukiman masyarakat pada kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka adalah tingkat pendidikan masyarakat di permukiman tersebut.

Berdasarkan hasil kuisioner terhadap 50 orang responden serta didukung dengan data monografi kependudukan yang didapat dari Kepala Desa diperoleh bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah karena masih banyak masyarakat yang belum/tidak memperoleh pendidikan dengan baik yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 14 % responden. Walaupun ada sebagian masyarakat yang mendapat pendidikan namun tingkat pendidikan umumnya hanyalah tamat SD/ sederajat yaitu sebanyak 16 orang atau sebesar 32 % responden. Meskipun ada beberapa yang sebagian besar sudah memiliki pendidikan menengah hingga ke perguruan tinggi. Rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Pombakka karena umumnya anak anak pada usia remaja sudah ikut membantu orang tuanya mengolah lahan pertanian atau ikut melaut mencari ikan bersama orang tuanya yang mengakibatkan anak anak putus sekolah.

2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pombakka

Berdasarkan data hasil kuisioner kepada 50 orang responden diperoleh data jenis pekerjaan masyarakat di Desa Pombakka terbagi atas dua yaitu :

- a) Bekerja sebagai petani. Berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan kepada responden , ditemukan bahwa pekerjaan utama masyarakat di Desa Pombakka adalah petani yaitu sebesar 52 % atau 26 responden. Pekerjaan utama sebagai petani masyarakat di Desa Pombakka karena wilayah nya berada di pesisir pantai dengan lahan usaha didominasi lahan usaha berupa tambak dan lahan pertanian.
- b) Bekerja Sebagai Nelayan. Masyarakat yang bermukim di Desa Pombakka juga umumnya bekerja sebagai nelayan yaitu sebanyak 32 % atau 16 responden. Letak pemukiman yang tepat berada di tepi Sungai Rongkong yang langsung bermuara ke laut Teluk Bone memudahkan masyarakat turun ke laut mencari ikan yang didukung potensi ikan yang melimpah disekitar Laut Teluk Bone dapat memberikan hasil yang melimpah pula bagi nelayan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya.
- c) Terdapat pula jenis pekerjaan masyarakat Desa Pombakka yaitu bekerja pada sector swasta sebanyak 8 % atau sebanyak 4 orang responden. Mereka yang bekerja pada sector swasta ini biasanya membuka kios dirumahnya atau melakukan dagang keliling berupa bahan kebutuhan pokok. Pedagang keliling saat melakukan penjualan kadang-kadang sampai ke wilayah desa lain juga. Terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai ASN yaitu yang mengajar di Sekolah Dasar yaitu sebanyak 6 % atau sebanyak 3 responden. Responden yang bekerja sebagai ASN tersebut setelah pulang mengajar mereka juga masih melakukan pekerjaan pada sector pertanian, namun itu hanya bersifat membantu keluarganya dan bukan sebagai pekerjaan pokoknya. Selain itu ada juga responden yang bekerja sebagai tukang batu yang merupakan pekerjaan pokoknya yaitu 2 % atau sebanyak 1 orang responden. Namun apabila terdapat waktu luang (tidak ada pekerjaan) turut juga membantu keluarganya pada sektor pertanian.

3. Hasil Usaha Masyarakat

Berdasarkan isian kuisioner oleh responden sebanyak 50 orang di Desa Pombakka, diperoleh data hasil usaha masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan maupun sector usaha lain yang ditekuni oleh masyarakat sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Desa Pombakka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pendapatan yang dimaksud adalah besarnya nilai pemasukan setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan selama kegiatan usaha berlangsung yang bervariasi yaitu :

- Pendapatan kurang dari Rp. 500.000,- setiap bulan sebanyak 18 % atau sebanyak 9 orang.
- Pendapatan antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- setiap bulan sebanyak 30 % atau sebanyak 15 orang.
- Pendapatan antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- setiap bulan sebanyak 18 % atau sebanyak 9 orang.
- Pendapatan antara Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- setiap bulan sebanyak 18 % atau sebanyak 9 orang.
- Pendapatan antara Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- setiap bulan sebanyak 18 % atau sebanyak 9 orang.
- Pendapatan lebih dari Rp. 2.000.000,- setiap bulan sebanyak 16 % atau sebanyak 8 orang.

E. Analisa Elemen Masyarakat (SOCIETY) Kondisi Sosial Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden masyarakat Desa Pombakka yang bermukim dilokasi rawan banjir maka temuan yang didapati sehubungan dengan kondisi lingkungan rumah tinggal yang paling berpengaruh terhadap keseimbangan permukiman elemen *society* yaitu karakteristik kehidupan sosial masyarakat yang umumnya hidup sebagai petani dan nelayan. Analisis kondisi sosial masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui

organisasi sosial, keagamaan masyarakat, dan jumlah anggota keluarga.

1. Organisasi Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Terdapat beberapa jenis organisasi kemasyarakatan yang aktif diikuti oleh masyarakat di Desa Pombakka dalam membina hubungan social kemasyarakatan yaitu Sistim Kegotong royongan masih kental dipraktekkan dalam kehidupan kemasyarakatan, misalnya ketika ada yang sedang membangun rumah atau hajatan perkawinan maka masyarakat dalam kampung bergotong royong memberi bantuan.

Masyarakat yang bermukim dilokasi rawan banjir di Desa Pombakka mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 80 % responden yang memeluk Agama Islam sehingga kehidupan mereka pada saat perayaan hari-hari besar Islam seperti Bulan Puasa, Idhul Fitri dan beberapa hari raya keagamaan dimana masyarakat merayakan hari hari raya tersebut sehingga aktifitas mengolah lahan pertanian atau nelayan turun ke laut di berhentikan sementara waktu. Pada masa masa hari raya dimaksud sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saling mengunjungi dan sekaligus bersilaturahmi antar masyarakat dalam kampung dan sebagian juga ada yang melakukan kunjungan keluarga di kampung lain.

Kehidupan sosial masyarakat yang bermukim disekitar lokasi rawan banjir sangat harmonis terpelihara tanpa membeda-bedakan suku, agama dan ras. Keharmonisan tersebut tercermin dalam hubungan kekeluargaan saling mengunjungi pada saat perayaan hari hari besar keagamaan, saling memberi bantuan bagi sesama yang membutuhkan sekalipun beda agama dan keyakinan, akan lebih meningkat dan lebih baik dari keadaan yang telah ada. Keharmonisan dan kerukunan anggota masyarakat seperti dapat menjadi modal masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

2. Jumlah Anggota Keluarga

Sesuai dengan data hasil kuisioner yang diambil pada 50 orang respon di Desa Pombakka tentang jumlah anggota keluarga respon yang terdiri dari Istri, anak atau kerabat yang tinggal bersama dalam 1 rumah tangga.

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara, sebanyak 50 % keluarga responden memiliki jumlah anggota keluarga 7-10 orang dalam 1 rumah. Mereka tinggal dalam satu rumah yang terdiri dari Bapak sebagai kepala keluarga, Ibu, anak 2-3 orang serta kerabat dekat turut tinggal bersama untuk membantu mengolah lahan pertanian berupa sawah atau tambak atau ikut membantu melaut mencari ikan maupun kegiatan usaha lainnya. Keluarga yang memiliki anggota lebih banyak (7-10 orang) cenderung memiliki lahan garapan yang lebih luas karena mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk mengelolanya sehingga tentu juga memiliki pendapatan yang cukup. Pola hidup masyarakat petani sangat dipengaruhi oleh kehidupan mereka sebagai masyarakat petani maupun nelayan. Karena pengaruh tersebut kelompok petani sawah atau tambak lebih cenderung untuk bertempat tinggal di dekat lahan garapan berupa sawah atau tambak sedangkan nelayan lebih cenderung memilih bermukim di daerah yang berdekatan dengan sungai dan laut.

F. Model Pengaruh Elemen Permukiman

Hasil regresi dengan menggunakan SPSS sebagai berikut:

Regression

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Networks X5, Masyarakat X3, Manusia X2, Rumah X4, Alam X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pola Permukiman Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.878 ^a	.772	.746	.49300	1.360

a. Predictors: (Constant), Networks X5, Masyarakat X3, Manusia X2, Rumah X4, Alam X1

b. Dependent Variable: Pola Permukiman Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.126	5	7.225	29.727	.000 ^b
	Residual	10.694	44	.243		
	Total	46.820	49			

a. Dependent Variable: Pola Permukiman Y

b. Predictors: (Constant), Networks X5, Masyarakat X3, Manusia X2, Rumah X4, Alam X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.358	.476		2.855	.007
	Alam X1	.111	.050	.459	2.235	.031
	Manusia X2	-.018	.045	-.047	-.412	.682
	Masyarakat X3	-.016	.037	-.044	-.440	.662
	Rumah X4	.003	.035	.010	.091	.928
	Networks X5	.112	.049	.483	2.272	.028

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Alam X1	.123	8.126
	Manusia X2	.392	2.549
	Masyarakat X3	.516	1.939
	Rumah X4	.423	2.367
	Networks X5	.115	8.692

a. Dependent Variable: Pola Permukiman Y

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan pengolahan data tersebut diatas dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nilai koefisien Elemen Alam (X1) sebesar 0,111
- Nilai koefisien Elemen Manusia (X2) sebesar - 0,018
- Nilai koefisien Elemen Masyarakat (X3) sebesar -0,016
- Nilai koefisien Elemen Rumah (X4) sebesar 0,003
- Nilai koefisien Elemen Jaringan (X5) sebesar 0,112

Sedangkan nilai koefisien korelasi yang menyatakan hubungan antara variable elemen permukiman dengan pola permukiman masyarakat adalah sebesar 0,878

Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan *software SPSS*, menunjukkan ada hubungan yang sangat nyata ($\text{sig} < 0.01$) antara elemen alam (X1), elemen manusia (X2), elemen masyarakat (X3), elemen bangunan (X4), elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) terhadap pola pemukiman (Y) pada kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara. Persamaan model regresi dapat dituliskan dalam bentuk model:

$$Y = 1,358 + 0.111 X1 - 0,018 X2 - 0,016 X3 + 0,003 X4 + 0,112X5$$

Dimana :

X1 = elemen alam

X2 = elemen manusia

X3 = elemen masyarakat

X4 = elemen bangunan

X5 = elemen jaringan sarana dan prasarana

Y = pola pemukiman

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta sebesar 1,358 menyatakan bahwa jika elemen alam (X1), elemen manusia (X2), elemen masyarakat (X3), elemen bangunan (X4), elemen jaringan sarana dan

prasarana (X5) sama dengan nol, maka pola pemukiman (Y) adalah sebesar 1,358 satuan.

- b) Nilai koefisien regresi variabel elemen alam (X1), adalah sebesar positif 0,111 artinya apabila elemen alam (X1) bertambah satu satuan, maka pola pemukiman (Y) bertambah positif 0,111 satuan. Koefisien regresi positif berarti elemen alam (X1) berkorelasi positif (berbanding lurus) terhadap pola pemukiman (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi elemen alam maka semakin tinggi pula pola pemukiman.
- c) Nilai koefisien regresi variabel elemen manusia (X2), adalah sebesar negatif 0,018 artinya apabila elemen manusia (X2) bertambah satu satuan, maka pola pemukiman (Y) berkurang 0,018 satuan. Koefisien regresi negatif berarti elemen manusia (X2) berkorelasi negatif (berbanding terbalik) terhadap pola pemukiman (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi elemen manusia maka semakin rendah pola pemukiman.
- d) Nilai koefisien regresi variabel elemen masyarakat (X3), adalah sebesar negatif 0,016 artinya apabila elemen masyarakat (X3) bertambah satu satuan, maka pola pemukiman (Y) berkurang 0,016 satuan. Koefisien regresi negatif berarti elemen masyarakat (X3) berkorelasi negatif (berbanding terbalik) terhadap pola pemukiman (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi elemen manusia maka semakin rendah pola pemukiman.
- e) Nilai koefisien regresi variabel elemen bangunan (X4), adalah sebesar positif 0,003 artinya apabila elemen bangunan (X4) bertambah satu satuan, maka pola pemukiman (Y) bertambah positif 0,003 satuan. Koefisien regresi positif berarti elemen bangunan (X4) berkorelasi positif (berbanding lurus) terhadap pola pemukiman (Y). Hal

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi elemen bangunan maka semakin tinggi pula pola pemukiman

- f) Nilai koefisien regresi variabel elemen jaringan sarana dan prasarana (X5), adalah sebesar positif 0,003 artinya apabila elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) bertambah satu satuan, maka pola pemukiman (Y) bertambah positif 0,112 satuan. Koefisien regresi positif berarti elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) berkorelasi positif (berbanding lurus) terhadap pola pemukiman (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi elemen jaringan sarana dan prasarana maka semakin tinggi pula pola pemukiman.

1. Uji Korelasi (r)

Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan *software SPSS* diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,878. Besarnya hubungan antar variabel elemen alam (X1), elemen manusia (X2), elemen masyarakat (X3), elemen bangunan (X4), elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) terhadap pola pemukiman (Y) yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,878. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat (kuat) (nilai r diantara 0.70-0.90) di antara elemen alam (X1), elemen manusia (X2), elemen masyarakat (X3), elemen bangunan (X4), elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) terhadap pola pemukiman (Y) pada kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara. Arah hubungan yang positif (tidak ada tanda negative pada angka 0,878) menunjukkan semakin tinggi elemen alam (X1), elemen manusia (X2), elemen masyarakat (X3), elemen bangunan (X4), elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) secara kolektif maka pola pemukiman (Y) akan meningkat, demikian pula sebaliknya.

Menurut Kennedy dan Neville (1976), korelasi adalah derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih dari data hasil pengamatan. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan dalam satu variabel diikuti oleh perubahan variabel

lain, baik yang searah maupun tidak. Hubungan antara variabel dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

- a) Terjadinya korelasi positif apabila perubahan antara variabel yang satu diikuti oleh variabel lainnya dengan arah yang sama (berbanding lurus). Artinya apabila variabel yang satu meningkat, maka akan diikuti peningkatan variabel lainnya.
- b) Korelasi Negatif Terjadinya korelasi negatif apabila perubahan antara variabel yang satu diikuti oleh variabel lainnya dengan arah yang berlawanan (berbanding terbalik). Artinya apabila variabel yang satu meningkat, maka akan diikuti penurunan variabel lainnya.
- c) Korelasi Nihil Terjadinya korelasi nihil apabila perubahan antara variabel yang satu diikuti oleh variabel lainnya dengan arah yang tidak teratur (acak). Artinya apabila variabel yang satu meningkat, kadang diikuti dengan peningkatan pada variabel lain dan kadang diikuti dengan penurunan pada variabel lain. Berdasarkan hubungan antar variabel yang satu

2. Uji Hipotesis dengan Uji t-Statistik (Uji Kelinearan Regresi)

Uji secara hipotesis dilakukan dengan uji-t. Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas (X) secara parsial terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini juga dilakukan untuk melihat secara statistik apakah koefisien regresi dari variabel dalam suatu model bersifat signifikan atau tidak. Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) bersifat linear. Selain itu, pengujian ini juga dilakukan untuk melihat secara statistik apakah koefisien regresi dari variabel X dalam suatu model bersifat signifikan atau tidak. Dengan menggunakan taraf signifikan sebesar $\alpha = 0,05$. Kriteria pengujian adalah: apabila nilai sig > 0,05 maka H₀ diterima (secara parsial elemen alam (X₁), elemen manusia (X₂), elemen

masyarakat (X3), elemen bangunan (X4), elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) berpengaruh tidak nyata pola pemukiman (Y)). Apabila nilai Sig < 0,05 maka H0 ditolak (secara parsial elemen alam (X1), elemen manusia (X2), elemen masyarakat (X3), elemen bangunan (X4), elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) berpengaruh nyata pola pemukiman (Y). Berdasarkan hasil Uji t-Statistik, diketahui bahwa:

- a) Nilai probabilitas (sig) koefisien regresi X1 adalah 0.031. Oleh karena probabilitas di bawah 0,05, maka keputusan tolak Ho sehingga secara parsial elemen alam (X1) berpengaruh nyata pola pemukiman (Y).
- b) Nilai probabilitas (sig) koefisien regresi X2 adalah 0.682. Oleh karena probabilitas di atas 0,05, maka keputusan terima Ho sehingga secara parsial elemen manusia (X2) berpengaruh tidak nyata pola pemukiman (Y).
- c) Nilai probabilitas (sig) koefisien regresi X3 adalah 0.662. Oleh karena probabilitas di atas 0,05, maka keputusan terima Ho sehingga secara parsial elemen masyarakat (X3) berpengaruh tidak nyata pola pemukiman (Y).
- d) Nilai probabilitas (sig) koefisien regresi X4 adalah 0.928. Oleh karena probabilitas di atas 0,05, maka keputusan terima Ho sehingga secara parsial elemen bangunan (X4) berpengaruh tidak nyata pola pemukiman (Y).
- e) Nilai probabilitas (sig) koefisien regresi X5 adalah 0.028. Oleh karena probabilitas di bawah 0,05, maka keputusan tolak Ho sehingga secara parsial elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) berpengaruh nyata pola pemukiman (Y).

Elemen permukiman yang paling mempengaruhi kondisi permukiman pada kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara adalah elemen alam (X1) dan elemen jaringan sarana dan prasarana (X5)

3. Uji F-Statistik (Uji Persamaan Model Regresi)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji model persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan *software SPSS* diperoleh Tabel analisis ragam (ANOVA), diketahui bahwa persamaan regresi menunjukkan tingkat signifikansi (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,000 atau praktis 0. Oleh karena probabilitas jauh di bawah 0,05, maka keputusan tolak H_0 artinya bahwa persamaan model dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y. Hal ini juga dapat berarti bahwa elemen alam (X1), elemen manusia (X2), elemen masyarakat (X3), elemen bangunan (X4), elemen jaringan sarana dan prasarana (X5) secara kolektif mempengaruhi pola pemukiman (Y) pada kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara.

4. Uji Model (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi adalah besarnya nilai variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X (X1, X2, X3, X4, dan X5). Hasil analisis menggunakan *software SPSS* menunjukkan angka R square adalah 0,772 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi). R square (r^2) dapat disebut sebagai koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti 77,2 % variabel pola pemukiman (Y) dapat dijelaskan oleh variabel X dalam hal ini elemen alam (X1), elemen manusia (X2), elemen masyarakat (X3), elemen bangunan (X4), elemen jaringan sarana dan prasarana (X5). Sedangkan sisanya ($100\% - 77,2\% = 22,8\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain. R square berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R square, semakin lemah hubungan kedua variabel.

Pola pemukiman pada kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara sekitar 77,2% dipengaruhi oleh elemen alam, elemen manusia, elemen masyarakat, elemen bangunan, dan elemen jaringan sarana dan prasarana sedangkan 22,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil identifikasi dan penilaian elemen permukiman pada lokasi penelitian yaitu : kondisi alam sangat buruk, kemampuan SDM masih sangat rendah , kehidupan sosial kemasyarakatan berlangsung dengan harmonis yang ditandai dengan sifat gotong royong masih dijunjung tinggi, kondisi fisik bangunan kurang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia dalam kondisi buruk dan sebagian tidak berfungsi dengan baik.
2. Pola Permukiman masyarakat di kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka sangat nyata dipengaruhi secara kolektif oleh faktor elemen permukiman yaitu alam, manusia, masyarakat, bangunan, jaringan sarana dan prasarana.
3. Secara parsial elemen permukiman alam dan jaringan sarana prasarana paling kuat mempengaruhi pola permukiman masyarakat di kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka Elemen permukiman yang paling mempengaruhi kondisi permukiman pada kawasan rawan bencana banjir di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan atas hasil penelitian tersebut diatas serta memperhatikan kondisi pada lokasi penelitian,

maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi instansi terkait untuk merencanakan pembangunan terutama di lokasi rawan bencana banjir.
2. Ruang lingkup lokasi penelitian yang terbatas pada wilayah desa, sehingga hasilnya belum bisa menggambarkan secara umum kondisi di Kabupaten Luwu Utara sehingga perlu dilakukan kajian lanjutan pada ruang lingkup wilayah yang lebih luas.
3. Perlu dilakukan penataan permukiman masyarakat melalui program relokasi ke tempat yang tidak terdampak bencana banjir namun dekat dengan lahan usahanya.
4. Hendaknya dilakukan pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pembuatan drainase dan penempatan sarana TPS yang memadai agar permukiman masyarakat di Desa Pombakka tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aswara Pressindo. Sleman, Yogyakarta
- Badwi, Nasiah. (2020). *Pemetaan Tingkat Rawan Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai Maros Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar : Universitas Negeri Makassar
- Bappeda, (2019). *Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan*. Bappeda Lutra.
- Budihardjo. E, (1997). *Pengembangan Sarana Dan Prasarana Permukiman Guna Perbaikan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Mantran Wetan Kabupaten Magelang*
- Cipto, Saefuddin. (2019). *Analisis Hujan Lebat yang Menyebabkan Banjir di Provinsi Sulawesi Selatan 22 Januari 2019*. Artikel. Makassar. BMKG
- Dassir, Muhammad. (2012). *Dinamika Sistim dan Formasi Sosial Petani Membangun dan Melestarikan Hutan*. Makassar: P3i Press
- Doxiadis, Constantin A (1967). *Ekistics: An Introduction to The Science of Human Settlements*. 141, Aug. New York : Oxford University Press.
- Doxiadis, Constantin A (1974). *Four Red Books: To Help Us Understands What Will Happen to our Human Settlements and What We Are to do Save Them*. New York: Oxford University Press
- Gazhali, Imam. (2018). *Analisis Multivariate dengan SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Koestoer, Raldi Hendro. (2001). *Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus*. Jakarta: Universitas Indonesia

- Masri. (2010). *Identifikasi Karakteristik Sosial, Ekonomi, Dan Budaya Masyarakat Petambak Sungai Limau Di Kabupaten Padang Pariaman Dalam Penyediaan Perumahan Permukiman*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro.
- Mastutie, Faizah. (2002). *Keragaman Pola Perubahan Rumah Di Permukiman Nelayan Biringkanaya Makassar*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nur, Afni. (2011) *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Proyeksi Tingkat Kerentanan Banjir Dengan Simulasi GIS (Geography Information System) Di Kelurahan Manuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar*.
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Pratama, Gunawan and Tarigan, Jarto and Nurs anty, Nursanty (2017) *Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara*. Masamba: BPBD Lutra
- Putra, Alius. (2006) *Pola Permukiman Melayu Jambi (Studi Kasus Kawasan Tanjung Pasir Sekoja)*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Rusdianto, Eko. (2019). *Banjir Sulawesi Selatan, Cermin Buruk Pencegahan Bencana?* Mongobay: Situs Berita Lingkungan Hidup
- Rustiadi, Ernand dan Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sandjaja, B dan Albertus Heriyanto. (2006). *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Surya, Batara. (2015). *Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota*. Makassar: Fahmis Pustaka
- Talita, Claudia. (2016). *Ekistics Dalam Permukiman Nelayan Pesisir Pantai Sindulang Satu*. Manado: Media Matrasain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

